



BULETIN VIRAJATI
MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD
Edisi XI Agustus 2021

SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

Bela Negara

DALAM MENGHADAPI ANCAMAN

Cyber War



ISSN 2086-9312



9772086931295

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi XI bulan Agustus 2021 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan menarik dan bermanfaat.

Pada kesempatan edisi kali ini, bertepatan dengan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk "Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Cyber War". Tajuk ini diangkat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya bela negara bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi ancaman perang maupun konflik siber ditengah kondisi keterbatasan teknologi siber nasional dan ketergantungan masyarakat pada ruang siber.

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, diantaranya Kemampuan Literasi Digital dan Profesionalisme Prajurit TNI AD di Era Disrupsi, Analisis Strategi Negara Slovakia dalam Menghadapi Ancaman Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Masalah Papua Ditinjau dari Aspek Geopolitik, Diplomasi Pertahanan dan Kampanye Militer yang Dilakukan Beberapa Negara di Dunia dalam menghadapi Konflik serta sejumlah informasi menarik lainnya.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan ini bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si,

Penasihat

Brigjen TNI Dwi Endrosasongko, S.Sos.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Sekretaris Redaksi

Mayor Chb Untung

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Asmadi

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Penata Muda/III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl. Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

http://www.seskoad.mil.id

Facebook

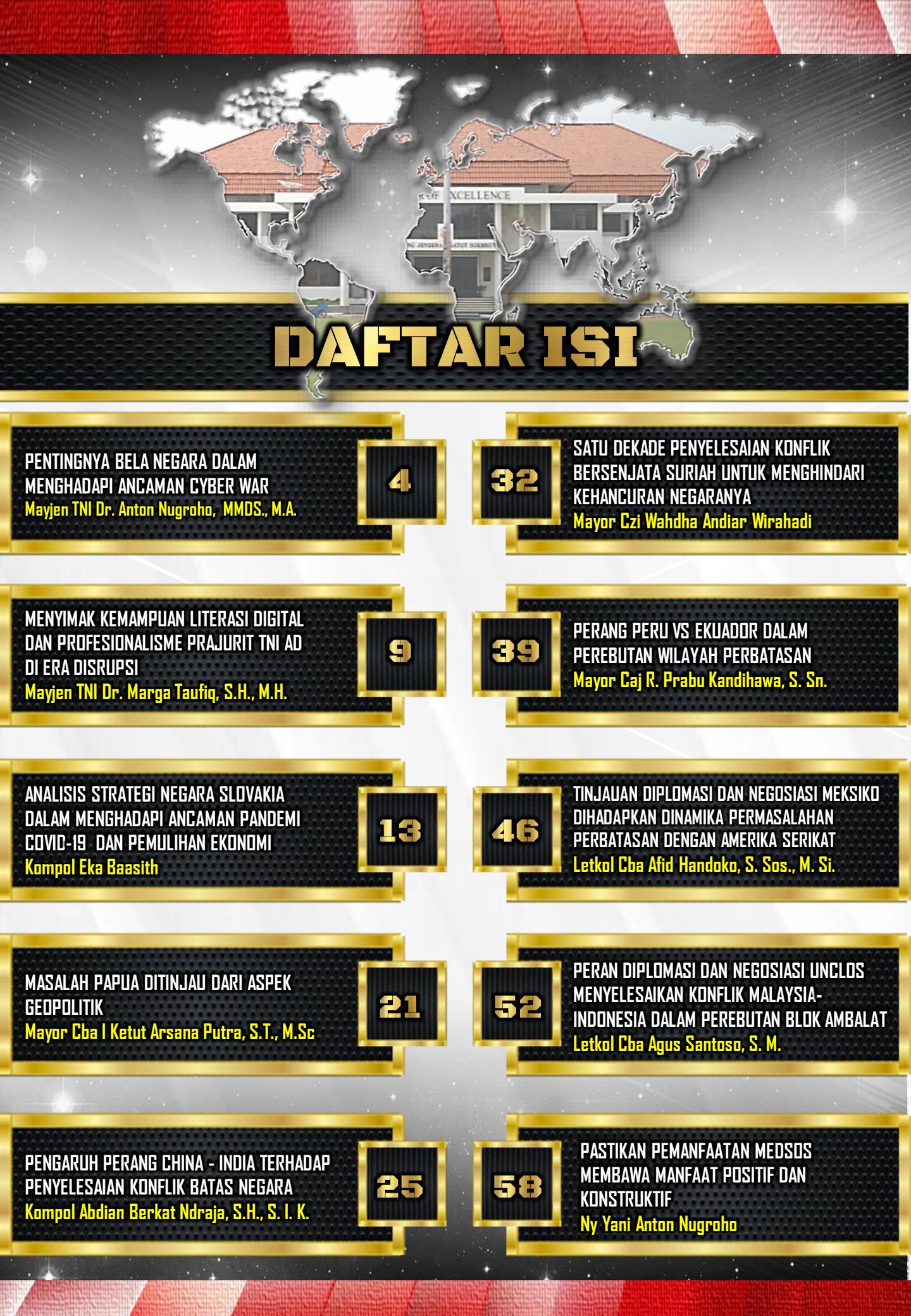
Https://www.facebook.com/Buletinvirajati

Instagram

Https://www.instagram.com/Buletinvirajati

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Jurnal Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Jurnal Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



DAFTAR ISI

PENTINGNYA BELA NEGARA DALAM
MENGHADAPI ANCAMA CYBER WAR
Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A.

4

SATU DEKADE PENYELESAIAN KONFLIK
BERSENJATA SURIAH UNTUK MENGHINDARI
KEHANCURAN NEGARANYA
Mayor Czi Wahdha Andiar Wirahadi

MENYIMAK KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL
DAN PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD
DI ERA DISRUPTIF
Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H.

9

PERANG PERU VS EKUADOR DALAM
PEREBUTAN WILAYAH PERBATASAN
Major Caj R. Prabu Kandihawa, S. Sn.

ANALISIS STRATEGI NEGARA SLOVAKIA
DALAM MENGHADAPI ANCAMA PANDEMI
COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI
Kompol Eka Baasith

13

TINJAUAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI MEKSIKO
DIHADAPKAN DINAMIKA PERMASALAHAN
PERBATASAN DENGAN AMERIKA SERIKAT
Letkol Cba Afid Handoko, S. Sos., M. Si.

MASALAH PAPUA DITINJAU DARI ASPEK
GEOPOLITIK
Major Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc

21

PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI UNCLOS
MENYELESAIKAN KONFLIK MALAYSIA-
INDONESIA DALAM PEREBUTAN BLOK AMBALAT
Letkol Cba Agus Santosa, S. M.

PENGARUH PERANG CHINA - INDIA TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK BATAS NEGARA
Kompol Abdian Berkhat Ndraja, S.H., S. I. K.

25

PASTIKAN PEMANFAATAN MEDSOS
MEMBAWA MANFAAT POSITIF DAN
KONSTRUKTIF
Ny Yani Anton Nugroho



PENTINGNYA BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER WAR

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A.

Pendahuluan

Saat ini dunia memasuki revolusi industri keempat atau yang biasa disebut Industri 4.0. Revolusi industri pertama dimulai pada abad 18-19 dengan adanya penemuan mesin uap yang membantu proses mekanisasi dalam pekerjaan rutin yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya produksi industry secara massal dengan melibatkan tenaga listrik menandai datangnya revolusi industri kedua, disusul dengan revolusi industri ketiga dimana mulai bermunculan teknologi informasi, elektronik dan otomasi, yang mengarah pada revolusi industri keempat yaitu perkembangan cyberspace/ruang siber. Tentunya era Industri 4.0 membawa kemudahan dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, namun sayangnya era ini juga memunculkan dimensi baru perang yaitu dimensi cyberspace/ruang siber.

Kemunculan dimensi cyberspace/ruang siber yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan perang menimbulkan ancaman yang kompleks dan terus berubah seiringnya pesatnya perubahan teknologi siber. Hal ini tentunya memberikan permasalahan yang cukup signifikan bagi Indonesia dengan

tertinggalnya perkembangan teknologi keamanan siber Indonesia secara nasional serta ketergantungan Indonesia pada teknologi digital dan penggunaan internet pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara kuantitas menurut Data Laporan Serangan Siber Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), telah terdapat lebih dari 296 juta percobaan serangan siber ke Indonesia dan bahkan selama pandemi Covid 19 serangan siber ini meningkat sebanyak 4 kali lipat dari tahun 2019.¹

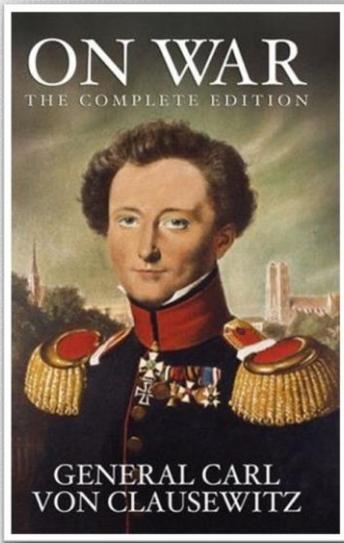
Pembahasan dari tulisan ini adalah memberikan penjelasan tentang karakter dan ancaman perang siber, sehingga dapat dipahami bagaimana pentingnya bela negara bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi ancaman perang maupun konflik siber ditengah kondisi keterbatasan teknologi siber nasional dan ketergantungan masyarakat pada ruang siber.

Pembahasan

Secara sederhana definisi perang siber adalah perang yang dilaksanakan di ruang siber. Namun sesungguhnya sampai dengan saat ini masih banyak terjadi perdebatan apakah perang yang dapat diselenggarakan di ruang siber bisa didefinisikan sebagai bentuk perang baru atau

1. Ceramah Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian

hanya sebatas serangan siber maupun kejahatan siber.



Perang menurut Clausewitz adalah "kelanjutan dari suatu kebijakan politis maupun diplomasi dengan cara lain. Bila diperjelas lebih lanjut, perang menurut Clausewitz adalah jalan terakhir bila diplomasi dinyatakan gagal serta melibatkan setidaknya dua negara karena hanya negara yang memiliki perangkat diplomasi dan kebijakan politis".

Hal ini sejalan dengan pengertian perang berdasarkan prinsip-prinsip *Jus ad Bellum* dimana perang harus dideklarasikan oleh otoritas pemerintahan yang sah dan tepat, perang hanya bisa dilaksanakan bila memiliki penyebab yang dapat diterima secara rasional dan internasional serta memiliki pertimbangan moral, proporsional dan jalan terakhir. Bila melihat dua definisi perang yang diakui secara global tersebut akan sangat sulit membuktikan keabsahan serangan siber sebagai suatu bentuk perang karena *the nature and character of war*/sifat dan karakter perang yang sangat berbeda dengan dimensi perang sebelumnya.

Perbedaan yang sangat signifikan dari sifat dan karakter perang siber adalah anonimitas serangan siber dan kecepatan serangan siber dalam menargetkan objeknya. Contoh dari anonimitas serangan siber adalah serangan kepada Estonia yang berasal dari Rusia. Pada tahun 2007 pemerintah Estonia berencana untuk memindahkan patung *the Bronze Soldier of Tallin* dari pusat kota. Patung tersebut bagi Rusia menandakan aksi heroisme prajurit yang gugur dalam rangka membebaskan kota Tallinn dari pendudukan Jerman pada Perang Dunia. Rencana pemindahan patung yang dianggap Estonia sebagai bentuk penindasan menimbulkan ketegangan diplomasi antara Estonia dan Rusia yang memicu serangan

DDoS (Distributed Denial of Service) secara masif dan terorganisir. Sehingga timbul dugaan bahwa serangan tersebut ditenggarai oleh Pemerintah Rusia dan bahkan Estonia sampai meminta bantuan dari NATO untuk melindungi Infrastruktur Kritis Nasional mereka.



Patung the Bronze Soldier of Tallin di Estonia

Namun serangan siber yang dilancarkan dari wilayah Rusia tersebut tidak dapat dibuktikan sama sekali hubungannya dengan Pemerintah Rusia. Demikian juga dengan serangan siber yang diterima Georgia sesaat sebelum serangan konvensional Rusia pada tahun 2008 karena perpecahan provinsi South Ossetia and Abkhazia dari Georgia tidak dapat keterlibatan dari pemerintah Rusia.

Dari berbagai studi kasus yang dihubungkan dengan perang siber banyak pendapat yang menyimpulkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh perang siber jauh lebih kecil dari ancaman dan kehancuran yang ditimbulkan oleh perang di dimensi tradisional (darat, laut dan udara).

Bahkan serangan virus *Stuxnet* secara terintegrasi yang menyebabkan kegagalan Infrastruktur Nuklir Iran secara sistemis dan mengakibatkan kerugian finansial yang luar biasa tidak menimbulkan korban jiwa. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa perang siber merupakan bentuk perang yang lebih manusiawi tidak menimbulkan ancaman secara signifikan terhadap jiwa manusia.

Namun sesungguhnya pendapat bahwa ancaman bahwa perang siber relatif kecil dan terbatas jika dibandingkan dengan dimensi perang tradisional tidak sepenuhnya tepat. Pakar hubungan internasional dan strategi mendefinisikan masa kontemporer sebagai era kedamaian siber (*cyber peace*) dimana serangan siber saat ini masih berada pada ambang batas konflik dan belum melewati titik perang. Hal ini tentunya senada dengan analisa pada paragraf pembahasan tentang definisi perang dimana belum ada serangan siber yang dapat memenuhi prinsip-prinsip *Jus ad Bellum*.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa serangan siber saat ini hanya merupakan puncak dari gunung es kemampuan siber dalam penyelenggaraan perang. Sebenarnya fenomena gunung es kemampuan siber yang dapat dilihat dari kondisi saat ini merupakan kondisi strategis hubungan internasional dimana ada kekhawatiran penggunaan kemampuan dalam konflik bersenjata yang dapat melewati ambang batas titik perang. Perang pada abad ini bersifat *limited*.

Hal ini terjadi semenjak akhir Perang Dunia II dimana bermunculan negara-negara yang memiliki senjata pemusnah massal (Nuklir). *Deterrent effect* (daya tangkal) nuklir menimbulkan kehati-hatian dari semua negara yang berkepentingan untuk menyelenggarakan kebijakan politik dan diplomasinya dengan jalan perang dengan kekuatan terbatas pada tataran konflik.

Perang modern saat ini lebih diwarnai dengan *grey zone activities* (aktifitas di daerah abu-abu) yang didukung oleh kemampuan siber dalam bentuk perang informasi. Perang informasi yang didukung dengan kemampuan siber sesungguhnya jauh lebih berbahaya jika dibandingkan serangan siber untuk menghancurkan infrastruktur kritis nasional. Bahaya perang informasi berkemampuan siber yang menargetkan paham, ideologi, dengan upaya pembentukan opini untuk menyerang konsistensi maupun kedaulatan suatu negara sangat nyata dan sesuai dengan pendapat Kepala BSSN yang menyampaikan bahwa sasaran non-fisik serangan siber menargetkan

kepada psikologis individu, kelompok, masyarakat dan bangsa untuk mengubah Emosi, Sikap, Tingkah Laku, Opini, dan Motivasi (ESTOM), bahkan ideologi sesuai dengan yang diharapkan pihak penyerang. Sasaran ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.²



Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian

Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, ancaman perang modern saat ini yang menyasar bangsa Indonesia dan berkaitan erat dengan penggunaan siber dalam penyelenggaraan perang informasi terdiri dari 3 jenis ancaman, antara lain: *Proxy War*, Separatisme dan Radikalisme. Dimana terdapat beberapa pola yang hampir identik dari ketiga bentuk ancaman tersebut yaitu penggunaan informasi melalui internet, sosial media dan berita bohong untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dengan metode propaganda untuk mengubah ideologi, perilaku, kebiasaan, dan budaya untuk mempengaruhi bangsa Indonesia sehingga melakukan aksi radikalisme maupun separatisme yang akhirnya meruntuhkan kedaulatan NKRI.³

Ancaman dari penggunaan ruang siber dalam perang opini menjadi berlipat ganda karena kecepatan dan kemudahan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya melalui penggunaan sosial media. Hal ini nyata ditunjukkan dalam peran *twitter/facebook revolution* pada peristiwa Arab Springs yang merupakan rangkaian protes melalui platform sosial media yang akhirnya menjatuhkan negara-negara di jazirah Arab maupun Afrika.

2. Ceramah Kepala BSSN 2019.

3. Ceramah Dirjen Pothan Kemenhan 2020.

Rangkaian protes yang awalnya dimulai di Tunisia pada tahun 2010 oleh Mohamed Bouazizi yang membakar diri dalam protes atas korupsi polisi dan perawatan kesehatan berujung kepada penggulingan beberapa pemerintahan yang berdaulat. Aksi yang dilakukan Mohamed Bouazizi memicu kemarahan sosial yang kemudian menunjukkan tingkat efektifitas sosial media menyebarkan informasi menggerakkan aksi sosial yang akhirnya menjadi aksi politikal.

Sosial media pada peristiwa Arab Springs menyediakan pergerakan aksi protes suatu platform yang mudah diakses, cepat, serta murah untuk merekrut, penggalangan dana, distribusi informasi melalui video dan gambar, perencanaan kegiatan serta mobilisasi aksi protes.

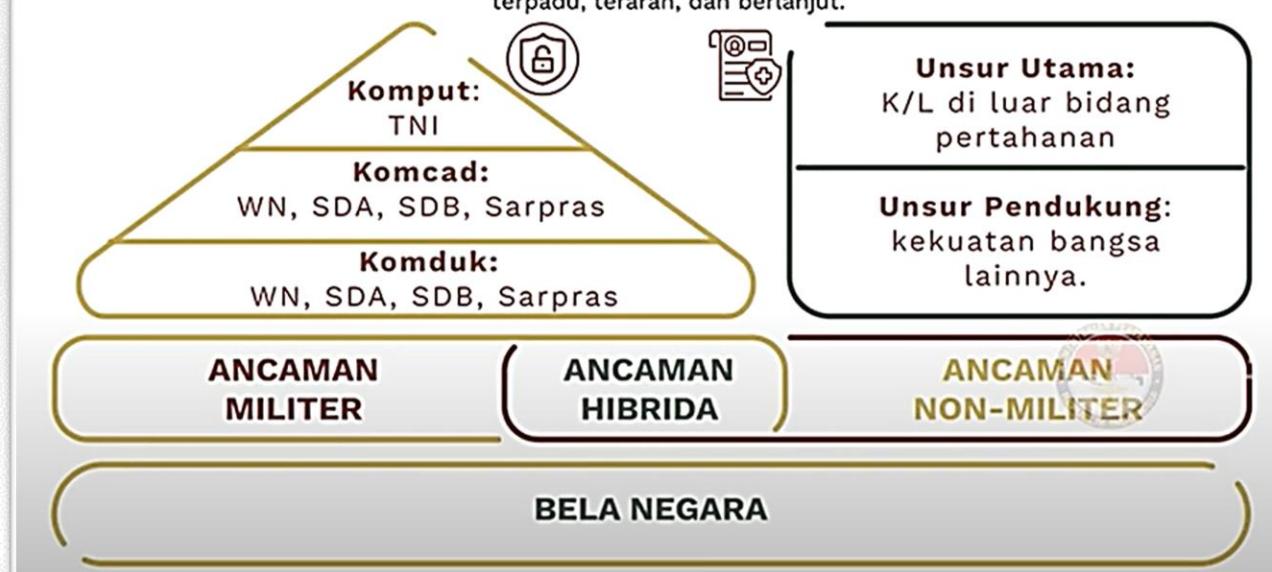
Namun kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi untuk merubah opini masyarakat melalui ruang siber pada peristiwa Arab Springs akhirnya berujung kepada maraknya aksi radikalisme di Timur Tengah. Hal ini terjadi karena perubahan yang terlalu cepat dimana institusi pemerintahan dan masyarakat tidak siap untuk menerima perubahan secara ekstrem.

Serta sifat penggunaan media sosial yang utamanya adalah menggunakan informasi untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan yang sah dengan mengangkat permasalahan sosial yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat tanpa memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif bagi perbaikan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penggunaan permasalahan sosial melalui ruang siber untuk merubah opini dalam rangka menghancurkan keutuhan berbangsa dan bernegara dapat dihadapi dengan pemahaman dan kesadaran bela negara sejak dini oleh generasi muda. Dalam penyelenggaraan pertahanan Indonesia yang berdasarkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) konsep bela negara merupakan landasan dasar penyelenggaraan sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman kepada bangsa Indonesia baik ancaman militer, non-militer maupun hybrid. Bela negara merupakan konsep dasar yang memberikan seluruh kalangan masyarakat kewajiban dan hak untuk menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan NKRI sebagai suatu bangsa dan negara.

SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA (SISHANKAMRATA) ⁴ (UU 3/2002: Ps 1 Angka 2)

yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.



Dalam menghadapi ancaman penggunaan ruang siber yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia, konsep bela negara bukan bertujuan untuk mengajak segenap masyarakat mengangkat senjata. Pentingnya konsep bela negara dalam menghadapi ancaman yang mengangkat permasalahan sosial dapat dilihat dari definisi bela negara yaitu: tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijewi oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan UUD 45 dan Pancasila dalam menjamin kehidupan bangsa dan negara dari ancaman. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa bela negara merupakan suatu tekad, sikap dan perilaku serta tindakan untuk menjaga, dengan penekanan pada kata menjaga.

Definisi kata menjaga sangat bertolak belakang dengan tujuan radikalisme, separatisme maupun jenis ancaman lainnya yang menggunakan ruang siber untuk merubah ideologi dan opini dengan menghancurkan sistem yang sudah ada dengan mengangkat permasalahan sosial. Menjaga dalam pelaksanaan bela negara membutuhkan segenap masyarakat untuk memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran dan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi.

Menjaga dalam pelaksanaan bela negara berarti menyelesaikan masalah pada akar permasalahannya dengan inovasi, kreasi serta membutuhkan usaha yang konsisten, terukur serta proses sesuai tahapan penyelesaian masalah. Konsep bela negara berbanding terbalik dengan penggunaan ruang siber sebagai dimensi perang yaitu kecepatan dan anonimitas yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan dengan sangat cepat dengan alasan permasalahan sosial tanpa menyediakan jawaban dari permasalahan tersebut. Sikap, tekad dan perilaku serta tindakan dalam pelaksanaan bela negara untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam rangka membantu pemerintah menjaga kedaulatan NKRI didasari oleh kecintaan terhadap tanah air. Dengan rasa cinta tanah air sebagai bentuk rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Upaya untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara sesuai bidang dan kemampuan dengan membantu menyelesaikan permasalahan sosial akan semakin efektif karena timbulnya rasa rela berkorban untuk demi kepentingan bersama. Wujud penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat sesuai konsep bela negara dapat dilihat dari pencapaian tujuh generasi muda yang diangkat

sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo yang melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan kontribusi positif demi perbaikannya, sebagai berikut: Adamas Belva Syah Devara, Founder dan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung, Founder dan CEO Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra, Founder dan CEO Amarta, Ayu Kartika Dewi, Pendiri Gerakan Sabang Merauke, Gracia Billy Mambrasar, Pendiri Yayasan Kitong Bisa, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Angkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise dan Aminuddin Ma'ruf, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016.

Daftar Pustaka.

1. Pembekalan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, 2020.
 2. Ceramah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, 2019.
 3. Clausewitz, Carl Von, *On War* (Princeton: Princeton University Press, 1984)
 4. Kemenhan, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015
 5. Tampubolon, Kartini Eliva Angel, 'Perbedaan Cyber Attack, Cybercrime, Dan Cyber Warfare', Jurist-Diction, 2.2 (2019), 539 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14250>>
 6. Wedermyer, Landon J, 'The Changing Face of War: The Stuxnet Virus and the Need for International Regulation of Cyber Conflict', 2012, 1–32
 7. Whyte, Christopher, and Brian Mazanec, *Understanding Cyber Warfare: Politics, Policy, and Strategy*, 2019
 8. Wolfsfeld, Gadi, Elad Segev, and Tamir Shefer, 'Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First', International Journal of Press/Politics, 18.2 (2013), <<https://doi.org/10.1177/1940161212471716>>
-

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS. M.A. Adalah Abituren Akmil 1988 dan lulusan US ARMY WAR COLLEGE (2014) serta LEMHANAS RI (2018). Saat ini menjabat sebagai Danseskoad.



MENYIMAK KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL DAN PROFESIONALISME PRAJURIT TNI AD DI ERA DISRUPTI

Oleh: Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H.

Pendahuluan

Disrupsi dapat digambarkan sebagai suatu perubahan drastis yang melenceng dari kebiasaan/tradisi yang telah ajeg/mapan. Disrupsi terjadi hampir di semua bidang kehidupan, dan terutama didorong oleh perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang sangat kuat. Barometer peradaban kini melaju dengan cepat dalam bingkai revolusi industri 4.0. Gempuran di berbagai ranah dan kepungan teknologi yang serba disruptif, mulai dari *Internet of Things* (IoT), *big data*, automasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligencia artificial berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah angka 4.0 di belakang revolusi industri.

Disrupsi teknologi terbagi menjadi dua perspektif, yakni disrupsi teknologi yang bersifat membangun (empowering) dan yang bersifat mengganggu (disturbing). Disrupsi yang bersifat membangun dapat dicontohkan antara lain hadirnya internet yang memungkinkan berkembangnya ekonomi digital, adopsi computing, dan *big data analysis* membantu pemerintah. Sedangkan disrupsi teknologi yang bersifat mengganggu dapat dicontohkan seperti hadir dan maraknya perkembangan hoaks dan ancaman kejahatan siber. Dalam hal ini, maka kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini.

Apa sebenarnya literasi digital dan dalam konstelasi prajurit TNI AD maka diperlukan sedikit kupasan ini. Merunut rilis hasil survei Literasi Digital Nasional 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi dan Katadata di 34 provinsi di Indonesia, responden menyatakan bahwa internet semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai pelosok, sebagian besar masyarakat juga menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara *online*. Tentu hasil survei ini.

Pembahasan.

Media sosial (Medsos) merupakan sebuah media *online*, penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Penggunaan media sosial, selain harus berhati-hati juga perlu etika dan kontrol guna meminimalisir dampak negatif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan ke arah yang merugikan. Berbagai peraturan dan ketentuan perlu dipedomani, termasuk UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008, pada dasarnya menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.

Pengguna internet dan media sosial di tanah air terus berkembang dan meningkat secara signifikan. Berdasarkan data dari riset terbaru Hootsuite dan We Are Social menyebut bahwa hingga bulan Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 15,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Sementara, menurut Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dinyatakan bahwa situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India, dengan jumlah pengguna aktif 170 juta orang dimana sebagian besar mengaksesnya melalui ponsel pintar dan sebanyak 51% digunakan untuk media sosial. Itulah sebabnya kenapa literasi digital yang baik perlu diaplikasikan di media sosial. Dari data pengguna media sosial di Indonesia yang begitu besar, maka peringatan hati-hati harus senantiasa disosialisasikan, termasuk pada kalangan prajurit TNI AD. Sebagai makhluk sosial, prajurit tentu juga memiliki kepentingan dan turut menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Demikian pula, TNI AD selain harus menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi dan menyampaikan kegiatan serta kebijakan pimpinan TNI AD kepada publik, juga harus turut aktif dalam upaya menjaga penyalahgunaan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan yang kontra produktif, mencegah penyebaran berita hoaks, dan kejahatan di media sosial.

Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui peranti komputer. Bawden (2001) menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis tetapi juga di masyarakat.



Literasi Digital TNI AD sudah bisa di akses via handphone

Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi.

American Library Association (ALA) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi, yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Penting untuk dipahami bahwa bahkan digital native yang tahu cara mengirim teks dan postingan ke media sosial tidak dianggap "melek digital" dengan cara apa pun. Literasi digital dalam pendidikan mencakup lebih dari itu. Yakni harus memiliki keterampilan khusus saat membaca teks online yang mungkin berisi sumber daya yang disematkan seperti hyperlink, klip audio, grafik, atau bagan yang mengharuskan siswa membuat pilihan. Bahkan siswa saat ini juga diminta untuk membuat, berkolaborasi, dan berbagai konten digital dan melakukannya secara bertanggung jawab.

Orang yang melek digital tahu cara menemukan dan mengkonsumsi konten digital. Mereka tahu cara membuat, berkomunikasi, dan berbagai konten digital. Siswa yang mengembangkan keterampilan literasi digital memahami dasar-dasar keamanan internet seperti membuat kata sandi yang kuat, memahami dan

menggunakan pengaturan privasi, dan mengetahui apa yang harus dibagikan atau tidak di media sosial. Jadi, kecakapan dalam menggunakan internet dan media digital bukan hanya tentang penguasaan teknologinya saja, tetapi bagaimana masyarakat mampu menggunakan media digital dengan penuh tanggung jawab.

Dalam upaya mencegah terjadinya dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial, Pimpinan TNI AD, telah mengeluarkan sejumlah ketentuan, aturan dan pedoman serta keharusan dan larangan terkait penggunaan Medsos. Hal tersebut dimaksudkan agar prajurit dan PNS TNI AD beserta keluarganya dapat menyikapi secara positif dan hati-hati menggunakan Medsos serta menghindari segala tindakan yang dapat merugikan serta berdampak terhadap citra buruk TNI AD, akibat kesalahan dalam menggunakan Medsos; dan lebih bijak dalam menggunakan Medsos. Yang berkembang justru internet yang tidak sehat seperti cyber bullying, sebar hoaks, iklan palsu, provokasi, berita kekerasan, hingga pelecehan seksual online yang meningkat di masa pandemi.

Semua itu memberi kecemasan, emosi, amarah yang memunculkan depresi. Bahkan survei WHO selama bulan Juni hingga Agustus 2020 menyebutkan sebanyak 60% orang yang tersebar di 130 negara mengalami permasalahan kesehatan mental. Di Indonesia sendiri usia 30-39 tahun mengalami kecemasan terbanyak yakni sekitar 76% akibat pandemi dan akibat ekosistem digital yang tidak sehat.

Selanjutnya potret literasi digital Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 5 dengan kualifikasi sedang, berdasarkan indeks literasi yang ditetapkan UNESCO tahun 2018 berjudul *"A Global Framework of Reference on Digital Literacy"*. Beberapa temuan menarik lainnya, antara lain, menyangkut (1) Akses dan Penggunaan: internet digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial dan menonton video secara online; media sosial seperti Whatsapp dan Facebook menjadi sumber utama informasi.

Kedua temuan ini penting untuk menentukan konten literasi paling efektif; (2) Kebiasaan Berbagi Informasi: keluarga dan tetangga adalah target utama berbagi informasi, Informasi dari tokoh agama paling mudah dipercaya; 30-60% responden mengaku pernah terpapar hoaks; (3) Literasi Digital: Sub-indeks Informasi dan Literasi Data skornya paling rendah; semakin tinggi literasi digital, semakin rendah kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoaks.

Upaya peningkatan literasi digital, untuk mendukung proses transformasi digital, Indonesia membutuhkan talenta digital sebanyak sekitar 9 juta orang selama 15 tahun atau 600.000 orang per tahun. Program Literasi Digital Nasional di 34 provinsi dilakukan dengan mengembangkan 4 pilar utama, yakni sebagai berikut:

- a. **Digital Culture**, membiasakan perilaku di ruang digital dengan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. **Digital Skills**; memahami dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK dalam meningkatkan produktivitas kehidupan sehari-hari;
- c. **Digital Safety**; meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. **Digital Ethics**; menetapkan perilaku yang mencerminkan profesionalisme, integritas, dan norma kemasyarakatan Indonesia.



Seri buku Literasi Digital yang di keluarkan Pemerintah RI via Kemeninfo

Dalam hal ini Kemkominfo telah menyediakan tiga bentuk stimulus program pelatihan kecakapan digital di beberapa tingkatan, yang mencakup, yakni :

- a. Kemampuan literasi digital tingkat dasar dalam program-program GNLD Siber-kreasi, yakni gerakan nasional yang terdiri dari 110 *stakeholders* dengan visi meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan literasi digital;
- b. Kemampuan di tingkat intermediate dalam Program Talent *Scholarship* dan Digital *Technopreneurship*. Program ini berfokus untuk menciptakan individu dengan kemampuan digital dengan level teknis di berbagai area strategis di era digital seperti *artificial intelligence*, *big data analytics*, *cloud computing*, *cybersecurity*, dan sebagainya;
- c. Kemampuan digital di tingkat *advance* dalam program digital *Leadership Academy*, dimana program ini berfokus pada praktisi chief-level dan expert baik di sektor publik maupun di sektor privat.

Literasi digital yang dibutuhkan untuk mendukung profesionalisme TNI AD, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. **Digital Skill**, memahami dan mengetahui cara menggunakan platform digital untuk penyusunan tugas pokok dan fungsi TNI AD: Personel TNI AD mampu menggunakan *platform digital creative* untuk penyusunan konten informasi publik terkait TNI AD yang bersifat menarik, Personel TNI AD mampu menggunakan digital tools untuk memonitor narasi publik yang beredar terkait isu-isu keamanan negara.
- b. **Digital Ethics**: mampu memahami etika berinteraksi di ruang digital: Personel TNI AD mampu mengidentifikasi konten-konten yang bersifat faktual dan yang bersifat hoaks; Personel TI mampu mengenali tindak lanjut penanganan konten hoaks, seperti melaporkan ke kanal aduan konten Kominfo.

c. **Digital Safety**; mampu memahami dan mencegah celah-celah ancaman ruang digital yang berasal dari sisi pengguna; Personel TNI AD mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi pola-pola social engineering hacking; personel TNI AD mampu mengelola keamanan digital pegawai yang dipakai secara pribadi maupun di lingkungan TNI AD, dengan menerapkan prinsip dan langkah-langkah teknis pengamanan data.

d. **Digital Culture**, mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Kebhinnekaan di dalam ruang digital, personel TNI AD mampu mempromosikan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di dalam diskusi ruang digital.

Penutup

Rekomendasi yang diperlukan adalah upaya nyata untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial, antara lain dengan : melakukan kerja sama dengan pihak terkait, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Cyber Crime* Polri, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), untuk melakukan penutupan dan pemblokiran terhadap situs yang berisikan konten negatif dan mengarah pada tindak kejahatan; perlu pemberdayaan Pussansiad dan segera merealisasikan pembentukan satuan siber di tingkat Kotama (Sansidam) untuk mengatasi ancaman siber dan untuk membangun ketahanan informasi, transfer knowledge dari lembaga/badan terkait dengan literasi data, mulai dari tingkat kecakapan dasar sampai dengan *advance*.

Memaksimalkan Jam Komandan dan pengawasan melekat bagi para prajurit TNI AD oleh Dansat, terutama dalam beraktivitas di media sosial, khususnya dalam budaya dan etika literasi digital di media sosial.

Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. Adalah Abituren Akmil 1987. Saat ini menjabat sebagai Pa Ahli Kasad Tk. III Bidang Sosbud Hankam dan Narkoba.



Pendahuluan

Penyebaran virus COVID-19 sejak teridentifikasinya kasus pertama di Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 telah merebak hampir keseluruhan negara di dunia. Dimana proses penularan antar orang begitu cepat, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun, puluhan juta orang terkonfirmasi positif di seluruh dunia dan sekitar 2,8% meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada negara yang mampu mengatasi, sehingga jumlah terkonfirmasi dari waktu ke waktu masih terjadi penambahan.

Wabah virus COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Dirjen WHO, Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, penetapan ini dilakukan mengingat tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan dari virus COVID-19.

Pandemi COVID- 19 sendiri tidak hanya menjadi masalah medis saja, akan tetapi sudah berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa setiap negara-negara di dunia yang terkena pandemi COVID-19 ini. Dampak yang ditimbulkan, terjadi pada berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta hubungan antar negara di dunia.

Aspek yang terpengaruh pun tidak berdiri sendiri, akan tetapi berpengaruh terhadap aspek lainnya, sehingga dalam penanganannya pun harus bersifat multi dimensi.

Dalam mengatasi dampak Pandemi COVID-19 di masing-masing negara berbeda, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masing-masing. Oleh karena itu, maka tingkat keberhasilan antar negara dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 pun beragam. Sehingga perlu kiranya kita memahami strategi penanganan dampak pandemi COVID-19 negara-negara di dunia, dalam rangka penyempurnaan strategi nasional Indonesia. Sehubungan hal tersebut Negara Slovakia merupakan salah satu negara Eropa yang mengalami pandemi COVID-19, dimana dari segi epidemiologi aspek pandemi COVID-19, sebagian besar media menilai Slovakia sebagai Negara Eropa yang paling sukses dalam perang melawan penyebaran COVID-19.

Harapan tulisan ini adalah didapatnya perbandingan atau perbedaan dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 berbagai negara, sehingga diperlukan sebuah bentuk tulisan yang dapat menguraikan atau menjelaskan tentang penanganan dampak pandemi COVID-19 di berbagai negara. Identifikasi masalah dari tulisan ini, didapat melalui beberapa pertanyaan, meliputi:

(1) Bagaimana kondisi pandemi COVID-19 di negara Slovakia ? (2) Negara tersebut mendapat rangking berapa di dunia di lihat dari sisi jumlah yang terpapar Covid-19 ? (3) Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi negara Slovakia ? (4) Bagaimana strategi dalam mengatasi kondisi tersebut ? (5) Apa persoalan yang dihadapi negara Slovakia terkait dengan pengadaan dan penggunaan vaksin ?.

Dari beberapa pertanyaan tersebut dapat dirumuskan permasalahannya: **Bagaimana Analisis Strategi Negara Slovakia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi ?** Hal tersebut, penting untuk memberikan gambaran mengenai peran negara Slovakia dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di negaranya, selain itu didapat strategi Negara Slovakia dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Adapun **metode** yang diterapkan dalam tulisan singkat ini merupakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kepustakaan dari berbagai referensi.

Nilai guna dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menganalisis suatu persoalan secara mendalam atas permasalahan dan pertanyaan yang perlu dipahami serta dicari solusi pemecahan persoalannya terkait bagaimana dinamika perkembangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, khususnya dalam hal ini di Negara Slovakia serta bagaimana strategi negara tersebut dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di negaranya.

Maksud dan tujuan dari penulisan esai ini untuk memberikan gambaran serta mendalami dan memecahkan persoalan guna meningkatkan kemampuan analisis secara mendalam atas suatu persoalan yang perlu dicari solusi atau implementasinya terkait dinamika pandemi COVID-19 di Slovakia dan strategi negara tersebut dalam menghadapi pandemi dan memulihkan kondisi perekonomian di negaranya.

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada permasalahan aktual yang timbul dan strategi negara Slovakia dalam menghadapi Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, dihadapkan pada beberapa persoalan terkait kondisi pandemi COVID - 19 di Slovakia,

dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi negara Slovakia, strategi dalam mengatasi kondisi tersebut, serta persoalan yang dihadapi Slovakia terkait pengadaan dan penggunaan vaksin.

PEMBAHASAN

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika tahun 2020 akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia di Planet Bumi ini. Seperti biasa, setiap memasuki awal tahun semua orang di berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, akan sibuk dengan rencana-rencana besarnya untuk mengisi tahun baru dengan hal-hal optimis: meraih prestasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun demikian, semua rencana indah tersebut menjadi kandas, bahkan sebelum dimulai implementasinya. Berawal dari berita sayup-sayup di penghujung tahun 2019 bahwa ada virus misterius menyerupai SARS telah muncul di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok. Perlahan tapi pasti, kabar tersebut menjadi kebenaran setelah Badan Dunia untuk Kesehatan (WHO) menyampaikan pengumumannya bahwa ada varian baru dari virus Corona muncul di Wuhan dan telah menjangkiti banyak orang. Pada tanggal 30 Januari 2020 kemudian WHO menyatakan bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemudian diberi nama sebagai Corona Virus Disease 2019 atau Covid19.

Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan lain-lain. Selain di China, muncul beberapa episentrum baru tempat di mana COVID-19 kemudian menyebar secara cepat, dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episentrum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung juga merambah Benua Australia dan Eropa. Di Eropa, Italia dan Spanyol merupakan episentrum penyebarannya. Berawal dari dua negara tersebut, COVID-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Slovakia, sebagai salah satu dari negara Eropa yang terjangkit kasus COVID - 19 ini di awal - awal pandemi

merupakan salah satu negara Eropa yang berhasil memerangi pandemi tersebut, namun saat ini dengan semakin berkembangnya virus COVID-19 tersebut di seluruh dunia yang semakin tidak terkendali, kasus COVID-19 di Slovakia kembali melonjak signifikan, bahkan membuat tenaga medis Slovakia kewalahan. Dimana untuk memaksimalkan penanganannya, Slovakia pun meminta bantuan kiriman tenaga medis dari negara-negara Uni Eropa. Dari kondisi tersebut, lebih lanjut akan dibahas satu persatu berdasarkan beberapa persoalan yang ditemukan dalam latar belakang diatas.



Kondisi Pandemi Covid-19 di negara Slovakia

Sekilas tentang Slovakia, dalam hal ini Slovakia memiliki populasi 5,4 juta. Ini merupakan ekonomi yang sangat berkembang (32.000 int \$. per kapita) di Eropa Tengah, merupakan salah satu anggota Uni Eropa dan Zona Euro (sejak 2004 dan 2009, masing-masing).

Harapan hidup rata-rata adalah 78 tahun, pengeluaran kesehatan adalah \$ 2.300 per kapita (setengah dari pengeluaran Inggris). Negara Slovakia berdiri pada tahun 1993, setelah pembubaran Cekoslovakia. Slovakia, didirikan pada 1 Januari 1993, merupakan negara yang tidak pernah menghadapi wabah penyakit dari setiap penyakit menular utama. Seperti negara lain, setidaknya di Eropa, Slovakia tidak beraksi segera terhadap resiko pandemi ketika wabah tersebut dimulai di China dengan merencanakan darurat umum dan mengalokasikan sumber daya. Namun, ketika resiko pandemi terbukti, Pemerintah Slovakia adalah salah satu yang pertama memberikan tanggapan yang cepat dan tegas, meskipun demikian dalam masa transisi pemerintahan.

Aktivitas pertama yang terkait dengan pandemi COVID-19 sudah dimulai sebelum pemilihan umum nasional ketika resiko semakin jelas. Misalnya pada 14 Februari 2020, sebuah sistem diorganisir di perbatasan Slovakia untuk mengidentifikasi orang-orang yang sakit. Pada 27 Februari 2020, Dewan Keamanan mengumumkan langkah-langkah anti-pandemi konkret pertama, yaitu kontrol perbatasan status kesehatan di semua bandara Slovakia dan penyeberangan perbatasan yang dipilih, terutama di perbatasan dengan Austria. Saat itu juga telah memulai pembelian alat bantu pelindung yang diperlukan. Dari fakta yang didapat, pandemi Virus Corona 2019-20 dipastikan telah menyebar ke Slovakia pada 6 Maret 2020, dengan satu kasus. PM Peter Pellegrini mengumumkan bahwa seorang pria berusia 52 tahun telah terinfeksi. Dia tidak bepergian ke manapun, tetapi putranya telah melakukan perjalanan ke Venesia, Italia dan diyakini bahwa putranya adalah pasien nol (orang pertama yang terinfeksi), yang kemudian dikonfirmasi. Keesokan harinya, tiga kasus positif dikonfirmasi, termasuk putra dan istri pria berusia 52 tahun itu.



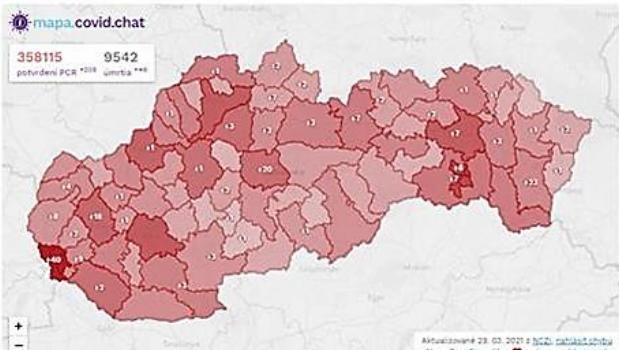
PM Slovakia Peter Pellegrini

Dalam beberapa hari berikutnya kasus COVID-19 telah naik menjadi 21 dari 832 yang diuji. Kemudian Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan interim, Peter Pellegrini, mengadopsi beberapa tindakan pencegahan paling serius di Eropa pada saat itu, termasuk larangan semua penerbangan internasional pribadi, perjalanan kereta api dan bus, larangan masuk dan keluar perjalanan asing yang tidak perlu, perbatasan cek, karantina 14 hari wajib untuk semua orang yang kembali

dari luar negeri dan penutupan sekolah nasional.

Dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, pada akhir September 2020, Slovakia mulai melihat gelombang kedua COVID-19, yang pada akhirnya mencapai median 7 hari saat ini dari 2.500 kasus, dengan 458 kasus per 1.000.000 (file Inggris saat ini mencapai 329 kasus per 1.000.000). Ini merupakan suatu kejutan besar, karena negara Slovakia hampir tidak melihat kasus apapun dalam gelombang pertama. Karena saat itu, berkat penguncian awal (*lockdown*) dan penutupan perbatasan, maka Slovakia menunjukkan kinerja terbaik di Eropa, dengan kasus paling sedikit dan jumlah kematian yang paling terendah. Hal ini jelas mereda selama musim panas, namun dengan adanya kebijakan membuka kembali sekolah, maka hal tersebut telah menimbulkan beberapa korban kembali.

Dalam hal ini negara menghadapi trade-off yang lebih dikenal: dengan istilah *lock down*, dengan mengeluarkan kebijakan tersebut maka munculnya hukuman dengan biaya yang cukup besar yaitu berupa keterpurukan ekonomi yang telah terpukul parah, atau terus melonjaknya dalam beberapa kasus, seperti dengan jatuhnya sistem perawatan kesehatan. Setelah gelombang pertama, PDB Slovakia turun sekitar, 10%. Hal tersebut membuat Menteri Ekonomi Slovakia ingin menghindari adanya upaya lockdown penuh kembali. Namun resiko untuk kasus sistem perawatan kesehatan yaitu dengan menderita kekurangan investasi dalam beberapa dekade terakhir, hal tersebut dirasakan sangat bagus. Dalam perawatan kesehatan, meski Slovakia memiliki kapasitas tempat tidur pasien 3 kali lebih banyak daripada Inggris dan cukup dengan memiliki persediaan (Slovakia menghasilkan ventilator per-kapita paling banyak).



Hal tersebut dapat dibandingkan dengan Republik Ceko yang bertetangga dengan Slovakia, hal ini merupakan contoh yang sangat serius dimana Republik Ceko menjadi negara terparah kedua di Eropa (1.053 per 1.000.000): perawatan kesehatan secara efektif runtuh, karena perawatan non-covid tidak lagi tersedia dan relawan turun tangan untuk menutup lubang bagi lebih dari 15.000 tenaga medis profesional yang telah sakit (terjangkit COVID-19).

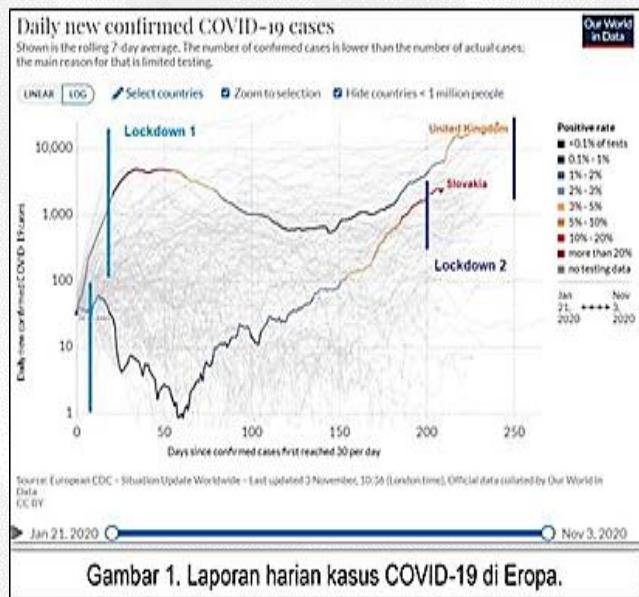
Sebagai negara yang dinilai telah berhasil dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada periode pertama, terdapat fakta bahwa Slovakia dengan sekitar 5,5 juta penduduk, dan juga sebagai anggota yang lebih kecil dari Uni Eropa, serta terletak di jantung Eropa telah berhasil mengatasi secara epidemiologi kasus pandemi COVID-19 di negara tersebut. Sebagian besar media menilai Slovakia sebagai yang paling sukses di Negara Eropa dalam perang melawan penyebaran COVID-19 (Walker dan Smith, 2020).

Pada 15 Mei 2020, Slovakia memiliki 1.480 kasus terdaftar yang didiagnosis dengan COVID-19 dan hanya 27 kematian, sedangkan jumlah pasien yang sembuh adalah 1.131 orang, dan 135.902 tes telah dilakukan. Menurut sebagian besar ahli, hasil kesehatan yang positif telah dicapai dengan sangat baik langkah awal dan efektif dan berkat respon positif (kepatuhan) oleh orang-orang Slovakia. Langkah-langkah awal yang ketat dan efektif untuk mengatasi krisis hanya mungkin dilakukan berkat kepemimpinan politik yang kuat di semua tingkat pemerintahan (Kettl, 2006).

Rangking Slovakia di dunia dari sisi jumlah yang terpapar Covid-19 Dari data dan fakta yang didapat, bahwasannya catatan kondisi kasus pandemi COVID-19 di Slovakia dari data terakhir (29 Maret 2021) menurut lokasi memperlihatkan data yang menarik, dimana menurut laman Worldometer, yang mencatat data COVID-19 dari 218 negara, Slovakia berada di peringkat 66 di antara negara-negara yang dilanda COVID-19, dengan kasus terkonfirmasi sebesar 358.115 orang, meninggal 9.542, dengan tingkat kematian kasus 2,60% dan kematian per 100.000 penduduk adalah 172.08.

Saat itu, peringkat pertama masih di tempati Amerika Serikat dengan total kasus sebanyak 30.549.435 dan total kematian sebanyak 555.577 jiwa. China yang menjadi sumber awal berjangkitnya COVID-19 saat itu berada di posisi 68 di antara negara-negara yang dilanda virus Corona jenis baru itu, dengan total kasus sebanyak 1.023 dan total kematian sebanyak 10 jiwa. Statistik itu menunjukkan bahwa China berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 dibandingkan banyak negara seperti AS, Brasil, India, Prancis, Inggris, Italia Prancis dan Spanyol. Selain China, negara yang dipuji dalam mengatasi pandemi adalah Selandia Baru dan Australia.

Adapun virus Corona varian Inggris saat ini, yang lebih menular daripada versi sebelumnya yang jumlahnya lebih banyak, telah mengambil alih sebagai penyebab utama kasus-kasus baru COVID-19 di Slovakia. Karena hingga 17 Februari 2021, sebanyak 3.632 pasien dirawat di rumah sakit, termasuk 608 orang dalam kondisi kesehatan yang serius dan harus ditempatkan di unit perawatan intensif (ICU) atau unit perawatan ketergantungan tinggi. Dihadapkan hal tersebut, kemungkinan dalam rangka mencari opsi melawan pandemi COVID-19 di negaranya, Slovakia mungkin akan membeli vaksin Sputnik V buatan Rusia, meskipun vaksin itu belum terdaftar di Badan Obat Eropa (*European Medicines Agency/EMA*).



Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi negara Slovakia

Dampak yang terjadi terhadap sektor perekonomian negara Slovakia, sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini adalah bahwa adanya tindakan karantina yang ketat di seluruh negeri telah memperlihatkan bagaimana penurunan ekonomi Slovakia sangat besar dan diperlukan adanya perbaikan secara menyeluruh, namun hal tersebut belum disediakan dalam skala yang dibutuhkan. Masalah intinya adalah adanya keterbatasan sumber daya, dimana file Uni Eropa telah mengizinkan penggunaan alokasi dana Uni Eropa yang tersisa untuk melawan konsekuensi COVID-19.

Berkat keputusan Uni Eropa tersebut, Slovakia harus memiliki sekitar 4-5 miliar EUR yang tersedia untuk segera diimplementasikan terhadap langkah-langkah penanganan, ditambah dengan meminjam 4bnEUR tambahan melalui penerbitan obligasi pemerintah terhadap pasar keuangan internasional pada awal Mei (dari jumlah ini 1 miliar tersedia untuk digunakan mendukung upaya perekonomian nasional).

Dari sumber ec.europa.eu.dijelaskan bahwa pada tahun 2020, wabah global akan menyeret ekonomi Slovakia ke dalam resesi dan PDB akan turun 7,2%. Itu perkiraan didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian Slovakia dan mitra bisnis asingnya sangat terpengaruh oleh wabah selama 2 bulan. Kinerja ekonomi diperkirakan akan mengalami penurunan drastis terutama pada tahun kuartal kedua, di sektor jasa, industri dan bangunan. Pemerintah Slovakia berharap perekonomian akan berangsur-angsur menghidupkan kembali selama paruh kedua tahun ini, meskipun kebangkitan akan agak tidak merata di seluruh sektor, seperti yang pasti keterbatasan mungkin tetap ada. Perekonomian Slovakia dapat mengejar kinerja sebelum krisis pada akhir 2021, meskipun harapan sebelum krisis tidak akan pernah terpenuhi sepenuhnya.

Pada tahun 2020, PDB akan tertekan tidak hanya oleh investasi dan tidak adanya permintaan luar negeri tetapi juga dengan pembelanjaan domestik yang terbatas.

Meskipun pendapatan yang dapat dibuang dari populasi tidak turun dengan kuat, pengeluaran rumah tangga dipengaruhi melalui beberapa saluran, tindakan untuk menghindari penyebaran infeksi, kekhawatiran tentang infeksi dan ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Hilangnya pendapatan sebagian dikompensasikan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah, dan dengan demikian tingkat tabungan rumah tangga diharapkan untuk sementara tumbuh. Para ahli akan menderita sebagai kerugian akibat wabah COVID 19. Sebagai paradoks, neraca perdagangan dapat menghasilkan angka hitam sebagai pengeluaran yang lebih rendah dan akan menurunkan kuantitas barang dan jasa yang diimpor. Sedangkan pada tahun 2021, proses pemulihan akan terus berlanjut dan pada akhir tahun perekonomian dapat kembali ke level sebelum krisis. PDB, didukung oleh permintaan domestik dan luar negeri, diperkirakan tumbuh 6,8%. Ketidakpastian yang lebih rendah diharapkan dapat mendorong kegiatan investasi. Namun demikian, ekonomi akan tetap agak *overcooled*. Dengan demikian, menurut sumber *Global Growth Tracker* yang mengumpulkan data pertumbuhan ekonomi dunia, terutama yang melaporkan data kuartalan secara rutin ke IMF (Dana Moneter Internasional) melalui International Financial Statistics (IFS), serta data pertumbuhan yang dimasukan dalam *Global Economic Monitor* (GEM) Bank Dunia, hingga 1 Juni 2020, tercatat bahwa negara Slovakia memiliki angka minus 4,1% terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut dari kuartal selanjutnya.

Strategi dalam mengatasi kondisi permasalahan Covid-19 di Slovakia

Di awal-awal pandemi terjadi langkah-langkah yang diambil Pemerintah Slovakia terhadap permasalahan pandemi COVID-19 adalah dilakukan oleh Dewan Keamanan yang mengumumkan langkah-langkah anti-pandemi konkret pertama, yaitu kontrol di perbatasan dan status kesehatan di seluruh Bandara Slovakia serta penyeberangan perbatasan

yang dipilih, terutama di perbatasan dengan Austria. Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh Staf Krisis relatif membatasi kunjungan ke dalam rumah sakit, lembaga perawatan sosial dan penjara. Staf Krisis juga merekomendasikan hal tersebut ke setiap orang yang tiba di Slovakia harus tinggal di karantina secara sukarela, kota-kota dan organisasi nirlaba tidak menyelenggarakan kegiatan massa, dan bahkan gereja pun tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan sekalipun.

Selain itu, semua perjalanan internasional dibatalkan itu berlaku juga bagi pejabat publik dan melarang semua penerbangan dari Italia ke Slovakia. Tindakan terakhir adalah membentuk telepon kontak darurat dengan nomor di semua wilayah negara. Perdana Menteri mendorong warga untuk tidak bepergian dan tidak berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan massa.

Adapun langkah selanjutnya dimulai segera setelah pandemi itu terjadi, bahkan sebelum pertemuan berikutnya antara Staf Krisis dengan pemerintah daerah sendiri secara sukarela memutuskan untuk menutup sekolah menengah dan universitas, serta selanjutnya untuk menghentikan semua aktivitas kontak dan beralih ke pendidikan *on-line*.

Berangkat dari serangkaian tindakan anti-pandemi komprehensif yang diperlukan, pemerintahan baru Perdana Menteri Matovic tidak perlu lagi memulai dari nol setelah berkuasa pada 21 Maret 2020 sehingga tugasnya hanyalah bereaksi terhadap perkembangan baru yang timbul dari pandemi. Pemerintah baru PM Matovic memberlakukan strategi penanganan Pandemi dengan menerapkan langkah-langkah anti-pandemi yang lebih ketat. Mulai 25 Maret 2020, semua warga negara wajib memakai masker pelindung wajah di semua ruang publik. Jarak minimum antara orang menjadi dua meter. Semua warga diimbau untuk sebisa mungkin tinggal di rumah dan untuk membatasi segala jenis mobilitas. Toko-toko yang tetap buka diperintahkan untuk melayani saja orang berusia di atas 65 tahun antara pukul 9 pagi dan 12 siang; usia diverifikasi menggunakan identifikasi kartu-kartu.

Respirator berkualitas tinggi tidak tersedia untuk dijual kepada warga biasa. Yang paling tindakan sensitif adalah keputusan tentang karantina wajib yang diselenggarakan negara setelah 6 April 2020. Serta adanya Undang-undang yang memungkinkan untuk melacak lokasi semua ponsel disahkan. Dilanjutkan adanya kebijakan Pemerintah Slovakia dibawah kepemimpinan PM Matovic telah melakukan tes COVID-19 kepada seluruh warga berumur lebih dari 10 tahun. Program ini juga melibatkan militer, dimana pengujian massal ini memberlakukan sangsi berupa denda sebesar 1.485 poundsterling atau sekitar Rp.2,8 Juta bagi mereka yang tidak mau ikut tes antigen.

Persoalan negara Slovakia terkait dengan pengadaan dan penggunaan vaksin.

Dalam proses pengadaan dan penggunaan vaksin, Slovakia memiliki persoalan tersendiri, dimana dengan adanya transisi penggantian pemerintahan, dalam hal ini sejumlah koalisi telah berselisih dengan PM Matovic sebagai pemimpin Slovakia yang baru atas penanganan pemerintahan yang dipimpin olehnya terhadap pandemi virus corona jenis baru (COVID-19). Dalam hal ini ia menawarkan untuk mundur jika para mitra dalam koalisi empat partai pendukungnya menyetujui syarat yang diajukan.



Disini, Matovic telah terperosok dalam perselisihan dengan mitra koalisi sejak bertindak secara sepihak dan memutuskan untuk membeli vaksin untuk mencegah Covid-19 dari Rusia, Sputnik V.

Keputusan itu menyebabkan keributan di antara mitra koalisi yang memerintah dengan partai OLANO yang mendukung Matovic karena mereka ingin menunggu persetujuan Uni Eropa untuk vaksin.

Namun pada akhirnya, Slovakia telah mulai memvaksinasi penduduknya, dengan Vladimir Krcmery, yang merupakan anggota Komisi Pandemi Pemerintah, sebagai orang pertama di negara tersebut yang di vaksinasi. Ia disuntik dengan vaksin produksi Pfizer dan BioNTech.

PENUTUP

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwasannya negara Slovakia dengan penduduk sekitar 5,5 juta jiwa, dan juga sebagai anggota yang lebih kecil dari Uni Eropa, telah berhasil mengatasi secara epidemiologi kasus pandemi COVID-19 dan sebagian besar media menilai Slovakia sebagai yang paling sukses di Negara Eropa dalam perang melawan penyebaran COVID-19.

Rangking Slovakia di dunia dari sisi jumlah yang terpapar Covid-19 menurut laman *Worldometer*, yang mencatat data COVID-19 dari 218 negara, Slovakia berada di peringkat 66 di antara negara-negara yang dilanda COVID-19, dengan kasus terkonfirmasi sebesar 358.115 orang, meninggal 9.542. Terjadinya pandemi COVID-19 tentunya tidak bisa lepas dari dampak yang ditimbulkannya, seperti halnya terhadap perekonomian Slovakia, dimana dengan adanya tindakan karantina yang ketat di seluruh negeri telah mem-perlihatkan bagaimana penurunan ekonomi Slovakia sangat besar dan diperlukan adanya perbaikan secara menyeluruh, selain itu kinerja ekonomi diperkirakan akan mengalami penurunan drastis terutama pada tahun kuartal kedua, di sektor jasa, industri dan bangunan. Hal ini oleh Pemerintah Slovakia telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan dalam rangka perbaikan perekonomian negara tersebut.

Adapun strategi Negara dalam penanganan pandemi COVID-19, seperti halnya negara-negara yang sukses menangani pandemi, maka Slovakia pun telah menerapkan strategi melalui Langkah - langkah yang

diterapkan pemerintah terhadap warga penduduknya seperti yang paling sensitif adalah keputusan tentang karantina wajib yang diselenggarakan negara setelah 6 April 2020.

Namun penyelenggaraan penanganan pandemi COVID-19 di negara Slovakia tidak bisa lepas dari adanya permasalahan, khususnya pada proses pengadaan dan penggunaan vaksin, dimana adanya perselisihan di pemerintahan terkait pengadaan dan penggunaan vaksin yang dipilih.

Namun tentunya hal tersebut telah dapat diselesaikan oleh kedua pihak, dimana pada akhirnya Slovakia telah mulai memvaksinasi penduduknya, dengan menggunakan vaksin produksi *Pfizer* dan *BionTech*.

Dengan mengacu pada proses penanganan COVID-19 di negara Slovakia, maka dari itu, Pemerintah Indonesia dapat belajar banyak dari negara tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, sebagai rekomendasi maka saran yang dapat disampaikan adalah :

Pertama. Kepada seluruh Stakeholder serta komponen bangsa lainnya, perlunya "Sistem Koordinasi Rutin dan Sinergi Antar Aktor" Penanganan COVID-19 membutuhkan kerja kolektif yang melintasi sekat-sekat kementerian, sektor, dan level pemerintahan. Hal terpenting dalam membangun sistem koordinasi dan sinergi yang kokoh adalah menempatkan krisis ini sebagai *common agenda* yang dilepaskan dari ego sektoral dan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat kelompok maupun personal. Pengembangan sistem koordinasi dan sinergi bisa dikendalikan oleh BNPB yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sebagaimana amanat UU Kebencanaan. Dengan adanya sistem koordinasi dan sinergi ini, maka fragmentasi kebijakan dan respon atas krisis akan bisa diredam.

Sehingga implementasi kebijakan menangani COVID-19 akan berada dalam langgam yang lebih kurang sama sehingga dapat mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional dalam menghadapi ancaman khususnya ancaman wabah penyakit.

Kedua. Kepada pemerintah pusat, perlunya menerapkan "Kanal Kebijakan yang terintegrasi", sebuah kebijakan penanganan krisis akan bermakna dan efektif jika tertransmisi secara utuh dari lini atas sampai lini terbawah pemerintahan, termasuk masyarakat. Karakter kebijakan fragmented sebagaimana tersaji dalam minggu-minggu awal penanganan COVID-19 hanya berakhir pada tidak jelasnya penanganan.

Untuk itu, yang dibutuhkan segera adalah satu kanal kebijakan yang terintegrasi, yang menyambungkan semua lini stakeholders. Dengan demikian, akan ada interpretasi kebijakan yang setara diantara multi aktor dalam sistem politik dan pemerintahan di tanah air. Kanal kebijakan ini sekaligus akan bisa membangun public trust terhadap sistem penanganan pandemi COVID-19 sehingga dapat mewujudkan stabilitas nasional saat menghadapi berbagai ancaman.

Ketiga. Kepada Kemenhan, DPR dan kementerian terkait perlunya "Kebijakan Berbasis Science dan Evidence" Mengingat situasi krisis yang masih akan berlangsung, berbagai kebijakan baru untuk melakukan adjustment dengan situasi yang terus berkembang sangat diperlukan. Dengan semakin banyaknya akumulasi pengetahuan atas COVID-19 yang tersedia, serta berbagai perkembangan yang terus berlangsung, pemerintah perlu semakin mendasarkan pilihan-pilihan kebijakan penanganan COVID-19 pada science dan data-data kontemporer yang relevan. Proses policy learning semacam ini akan membuat kebijakan penanganan COVID-19 lebih terarah.

Kompol Eka Baasith S, S.I.K, M.Si. Adalah Keluarga Ikatan Alumni Dikreg LX Seskoad TA 2021 (IKAS). Mantan Kapolsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat, saat ini menjabat Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat.



MASALAH PAPUA DITINJAU DARI ASPEK GEOPOLITIK

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc

Pendahuluan

Pada jaman pemerintahan kolonial Belanda, keberadaan Papua sebagai geopolitik kurang begitu dianggap penting. Namun, perubahan dramatis terjadi pada saat dimana Jepang mengebom Pearl Harbor, serbuan yang mengobarkan mulainya perang pasifik. Jepang menginvansi Asia Tenggara yang merupakan daerah jajahan negara-negara barat seperti Inggris, Perancis, serta Belanda. Negara-negara tersebut yang kemudian disebut Sekutu merupakan musuh Jerman pada perang dunia II. Pada perang dunia II berkecamuk, Jepang merupakan aliansi Jerman. Jepang menginvansi Asia Tenggara pada 1942, semua jajahan negara Sekutu diambil alih Jepang. Indonesia dikuasai Jepang karena kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang tahun 1942. Amerika Serikat dimana pangkalan angkatan lautnya Pearl Harbor, dibom Jepang pada akhir tahun 1941, mundur ke Australia yang untuk sementara dijadikan basis militernya untuk menyerang balik Jepang. Perang dunia II terus berkecamuk, di Eropa, Jerman yang menyebabkan terjadinya perang dunia II mengalami perlawanan sengit dari negara-negara Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Begitu pun perang Pasifik yang merupakan medan perang dunia II yang terjadi di Asia Timur dan Tenggara, Jepang

menghadapi pembalasan Amerika Serikat, karena telah menyerbu Pearl Harbor.

Setelah perang dunia II berakhir yang ditandai dengan Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika. Begitu pula perang yang berkecamuk di Eropa, Jerman akhirnya menyerah kalah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia dibawah pimpinan Soekarno dan kawan-kawan, kemudian memanfaatkan kekosongan kekuasaan penjajah Jepang, memproklamirkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Wilayah negara Indonesia yang baru merdeka adalah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke. Kemenangan Sekutu pada perang dunia II, menyebabkan perubahan geopolitik dunia secara menyeluruh. Sekutu sebagai pemenang perang, kemudian datang lagi ke Asia Tenggara termasuk Belanda ikut serta dengan tujuan menjajah kembali Indonesia. Kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak diakui Belanda, yang menyebabkan pecah perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui beberapa perundingan antara lain Konfrensi Meja Bundar, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Bangsa Indonesia, walaupun masih dengan berat hati, ini dibuktikan di mana Papua masih di bawah cengkeraman kolonial Belanda.

Perang Dingin Mengubah Kebijakan Barat Terhadap Papua

Pasca berakhirnya perang dunia II, terjadi persaingan ideologi antara kapitalisme barat yang dipimpin Amerika melawan Komunisme pimpinan Uni Soviet. Pertentangan ideologi ini kemudian melahirkan apa yang dinamakan perang dingin. Asia Tenggara termasuk Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perang dingin yang terjadi antara Blok Barat melawan Blok Timur. Pada saat perang dingin memuncak, Indonesia di bawah Presiden Soekarno yang terkenal anti barat, lebih condong ke kiri. Persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur dalam perang dingin mengubah geopolitik dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Indonesia yang berupaya untuk merebut Papua lewat diplomasi menemui jalan buntu, akhirnya Soekarno memanfaatkan perang dingin untuk merebut Papua dari tangan Belanda.

Perkembangan pesat PKI di era Soekarno membuat Amerika begitu was-was, cepat atau lambat Indonesia akan jatuh ke tangan Komunis. Dengan alasan membendung perkembangan Komunis, Amerika berusaha menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno. Usaha itu mencapai puncaknya ketika Amerika terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Manado. Pemberontakan itu bertujuan untuk mengulingkan pemerintahan Soekarno, Amerika terlibat memberikan pasokan persenjataan kepada pemberontak, tetapi pemberontakan itu sendiri akhirnya dapat di tumpas. Gagal dalam pemberontakan Permesta, Amerika memberikan bantuan pendidikan kepada perwira-perwira Indonesia untuk mengikuti pendidikan militer di Amerika dengan tujuan untuk dipengaruhi menjadi perwira militer yang anti Soekarno.



Demonstrasi menentang kekuasaan Belanda di Irian Barat (Foto: Arsip Nasional)



Presiden Soekarno dan Ellsworth Bunker (Utusan Amerika Serikat) dalam perundingan Kembalinya Papua Barat Ke RI 19 Desember 1961
(Foto: Arsip Nasional)

Pada awal tahun 1960-an Presiden Soekarno menjalin hubungan baik dengan negara-negara Blok Timur khususnya Uni Soviet. Indonesia mendapat bantuan ekonomi maupun militer dari Uni Soviet. Delegasi kedua pemerintahan saling bertemu, dalam perjanjian itu Uni Soviet (Rusia) akan memberikan bantuan persenjataan dan teknologi. Melihat perkembangan ini, Amerika amat khawatir karena Indonesia dirasa semakin condong ke kiri, dengan demikian semakin mengancam kepentingan Amerika dan sekutunya.

Amerika Serikat sudah mulai khawatir sejak pada pemilu 1955, PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia.

Pada saat akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960-an perkembangan ideologi Komunis di dunia dan Asia Tenggara pada khususnya sangat masif. Negara Indocina seperti Vietnam Utara, Laos, Kamboja sudah di kuasai Komunis. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara baik dari segi jumlah penduduk dan wilayah. Hal menyebabkan Amerika dan sekutunya mengubah arah geopolitiknya mengenai Indonesia dan khususnya Papua. Amerika khawatir apabila Papua tidak segera diserahkan ke tangan Indonesia, Indonesia akan semakin condong ke Uni Soviet karena persamaan kepentingan yaitu sama-sama melawan barat. Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, Asia Tenggara akan tinggal

menunggu waktu untuk seluruhnya di kuasai Komunis.

Kekhawatiran Amerika sangat beralasan dengan segala sepak terjang Soekarno yang semakin condong ke Blok Timur. Amerika enggan menjual keperluan militer ke Indonesia yang diperlukan untuk merebut Papua, akhirnya Indonesia membeli dan mendapat bantuan persenjataan dan teknologi militer dari Uni Soviet secara besar-besaran. Amerika tidak mau memberikan bantuan senjata karena yang dihadapi Indonesia adalah Belanda yang nota bene anggota NATO. Indonesia pun mendapat pasokan senjata dari Uni Soviet untuk merebut Papua. Presiden Soekarno yang sudah merasa kuat di bidang militer karena mendapat bantuan Uni Soviet, akhirnya mengumandangkan TRIKORA untuk merebut Papua melalui kekuatan senjata dari tangan Belanda. Australia yang merupakan sekutu terdekat Amerika di kawasan ini, merasa terancam oleh kekuatan militer Indonesia, karena Indonesia memiliki pesawat-pesawat tempur yang dapat menjangkau wilayah Australia. Dengan alasan membendung perkembangan Komunis dan akan jatuh banyak korban bila terjadi perang, karena Indonesia memiliki persenjataan yang cukup canggih pada jaman itu, akhirnya Amerika Serikat pun menekan Belanda agar mau ke meja perundingan untuk membahas masalah Papua.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Papua di Era Sekarang

Papua merupakan wilayah yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan dengan penduduk atau sumber daya manusia yang terbatas dalam pengelolalan sumber daya alam. Saat ini pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memilih pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua.

Pada masa lalu memang pendekatan untuk me-nyelesaikan masalah Papua adalah lebih mengedepankan sektor keamanan (militer) sehingga sering didengungkan oleh negara barat tentang adanya pelanggaran HAM. Tetapi saat ini di era Presiden Jokowi, bahwa Papua dipilih menjadi salah satu fokus pemerintah

pusat dalam pembangunan untuk megejar ketertinggalan ekonomi dibanding daerah lain di Indonesia. Presiden Jokowi pun kerap berkunjung ke Papua dua hingga tiga kali setiap tahunnya. Setidaknya ada lima proyek pembangunan yang dilakukan presiden Jokowi, salah satunya proyek jalan Trans-Papua. Pembangunan jalan sepanjang 4.330,07 kilometer untuk menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Jalan yang diharapkan mampu meningkatkan mobilisasi dan perekonomian masyarakat Papua itu membentang dari Kota Sorong hingga Merauke.



Presiden Joko Widodo di Papua

Pemerintah juga membangun Jembatan Hamadi-Holtekam yang menjadikan Jayapura sebagai pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jembatan sepanjang 328 meter dengan bentang utama 732 meter ini berada di atas Teluk Youtefa yang menghubungkan Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga tak luput memperbaiki jaringan listrik di Papua dengan membangun setidaknya enam pembangkit dan gardu listrik. Presiden Jokowi juga membangun Bandara Sentani yang merupakan bandara terbesar di Papua dan menjadi penghubung utama menuju wilayah pedalaman di provinsi itu.

Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan "BBM satu harga" di Papua. Dengan segala pembangunan itu, presiden Jokowi dinilai bisa menangani akar permasalahan sosial dan kesenjangan di provinsi tersebut. Pelayanan publik di Papua juga masih menjadi yang paling buruk di Indonesia. Indeks pembangunan manusia Papua juga masih berada di tingkat terendah di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir.

Untuk pemerintah saat ini terus melakukan pembangunan di seluruh Papua termasuk juga Papua Barat.



Proyek Kereta Trans Papua yang dirancang Presiden Joko Widodo

Tetapi dilain pihak, terutama kelompok pemerhati HAM, menganggap proyek pembangunan era Presiden Jokowi tak menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Pemerintah Indonesia harus mengakui bahwa tidak ada negara yang tidak punya masalah HAM. Gangguan keamanan yang akhir-akhir ini kerap terjadi penembakan di beberapa wilayah Papua, penahanan aktivis lokal, hingga bentrokan berujung kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua membuat komitmen pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi tidak kendor dan semakin menggenjot pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia di Papua.

Pertimbangan kepentingan geopolitik strategis dan jangka panjang yaitu membendung komunisme di Asia Tenggara, akhirnya Belanda di bawah tekanan Amerika mau menyerahkan Papua ke tangan Indonesia melalui meja perundingan. Amerika menekan Belanda untuk segera menyerahkan Papua ke tangan Indonesia dengan tujuan, Amerika dan sekutunya berusaha merebut simpati Soekarno yang pada tahun 1950-an memang termasuk salah satu tokoh dunia yang berpengaruh pada negara-negara Non Blok, agar tidak semakin condong ke kiri. Menurut pandangan Amerika dan sekutunya, Indonesia secara kultural memiliki potensi untuk membendung komunisme karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Memang permusuhan tidak ada yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.

Di masa saat ini sampai dengan masa yang akan datang, Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena kekayaan alam yang melimpah serta letak geografis yang strategis. Negara seperti Amerika dan Australia mempunyai kepentingan terhadap Indonesia dan Papua khususnya. Amerika berkepentingan terhadap Papua karena perusahaan Amerika mempunyai hak untuk mengelola pertambangan di bumi Papua (Free Fort), sedangkan Australia juga termasuk Amerika berkepentingan dengan Indonesia dalam rangka kerjasama menjaga keamanan dari ancaman kekuatan baru dari utara yaitu China. Artinya secara geopolitik Indonesia khususnya Papua merupakan wilayah yang sangat strategis baik dari letak geografis maupun sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga memang pemerintah pusat harus betul-betul konsisten membangun Papua untuk mengejar ketertinggalan dengan wilayah Indonesia lainnya.



Kerusuhan di Manokwari Papua Agustus 2019

Penutup

Demikianlah kilas balik perubahan geopolitik Papua dari masa era perang dunia II (kemerdekaan Indonesia) dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Negara barat menaruh kepentingan besar terhadap Papua karena memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah.

Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc adalah abituren Sepa PK 2000, Keluarga Ikatan alumni Dikreg LX TA 2021 Seskoad. Jabatan Kasi Organisasi Bagorgas Sdircab Pusbekangad



PENGARUH PERANG CHINA – INDIA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK BATAS NEGARA

Kompol Abdian Berkat Ndraja, S.H., S. I. K.

Pendahuluan

Dalam ruang lingkup hukum internasional dan hukum nasional, pengakuan terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara yang antara lain menyangkut dengan wilayah negara terutama dalam konteks wilayah daratan (*land territory*), dan karenanya tidak ada negara yang diakui tanpa wilayah negara. Dengan kenyataan ini, maka suatu negara selalu memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu yang diakui secara internasional dan nasional. Sedangkan menurut UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dinyatakan bahwa Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Namun pada kenyataannya konflik perbatasan antar negara kerap terjadi dan proses penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama. Bahkan sering berakhir dengan perperangan secara fisik dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Salah satu konflik berkepanjangan adalah sengketa perbatasan China-India. Sejak meletus perang China-India pada tahun 1962 terkait permasalahan batas negara sampai dengan tahun 2020 masih menemui kebuntuan. Data terakhir yang dilansir dari BBC News bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 terjadi bentrokan antara pasukan India dan China

yang menyebabkan 20 tentara India tewas di Ladakh. Insiden tersebut kian menambah ketegangan kedua negara dan merupakan bentrokan mematikan pertama di daerah perbatasan, setidaknya dalam 58 tahun. Juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian mengatakan India telah melintasi perbatasan dua kali, "memprovokasi dan menyerang personel China, mengakibatkan konfrontasi fisik yang serius antara pasukan perbatasan di kedua sisi". Patroli perbatasan juga sering bertabrakan satu sama lain, sehingga sesekali terjadi bentrokan. Tapi tanpa menggunakan senjata dalam empat dekade. Sengketa terakhir dimulai pada 5 Mei 2020, ketika terjadi keributan di Danau Pangong Tso, yang terletak 4.270 meter di atas permukaan laut di wilayah Himalaya, Ladakh. Personel militer India dan China bentrok dengan besi dan tongkat, dan bahkan saling melempar batu, melukai tentara di kedua sisi. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Mei 2020 satu regu tentara China dan India terluka dalam baku tembak dan lemparan batu ketika pertempuran meletus di Nathu La Pass di negara bagian Sikkim, India, hampir 1.200 km ke timur di sepanjang LAC.

Mencermati hal tersebut di atas, maka penulis menguraikan identifikasi masalah yang pertama, bagaimana latarbelakang konflik kedua negara?

Kedua, apakah langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) digunakan oleh negara tersebut? Ketiga, bagaimana solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasif? Selanjutnya Penulis memilih Perang China-India (1962) sebagai salah satu bahasan karena adanya pengaruh Perang China-India (1962) terhadap penyelesaian sengketa batas kedua negara hingga saat ini. Diplomasi pertahanan dimulai sejak tahun 2007 melalui kegiatan latihan militer bersama namun hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan di perbatasan kedua negara.

Adapun metode penulisan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis didasarkan pada pendekatan *study* perpustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur yang ada. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan nilai guna pribadi berupa pengalaman menganalisa permasalahan dalam perspektif akademis dan diharapkan bisa menambah referensi pembahasan terkait sejarah penyelesaian konflik melalui diplomasi dan negosiasi.

Esai ini bermaksud memberikan gambaran tentang pengaruh perang China-India (1962) terhadap penyelesaian konflik batas negara serta lesson learned yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Adapun tujuannya, sebagai sumbangsih pemikiran untuk menambah wawasan tentang berbagai sejarah perang di dunia dan proses perdamaian. Ruang lingkup pembahasan esai ini dibatasi pada variabel-variabel yang berkaitan dengan peristiwa perang China-India (1962) dan diplomasi gencatan senjata antar kedua negara dengan sistematika pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan.

Seperti halnya sejumlah perang lainnya yang melibatkan negara-negara bertetangga, perang China-India (1962) juga dipicu oleh masalah saling klaim atau sengketa wilayah di perbatasan. Ada 2 wilayah yang menjadi sumber sengketa, yaitu Dataran Aksai Chin di Kashmir dan Garis McMahon yang membelah wilayah Tibet. Untuk mengetahui lebih dalam asal muasal sengketa kedua wilayah tersebut.



Prajurit China dan India di perbatasan Wilayah Tibet

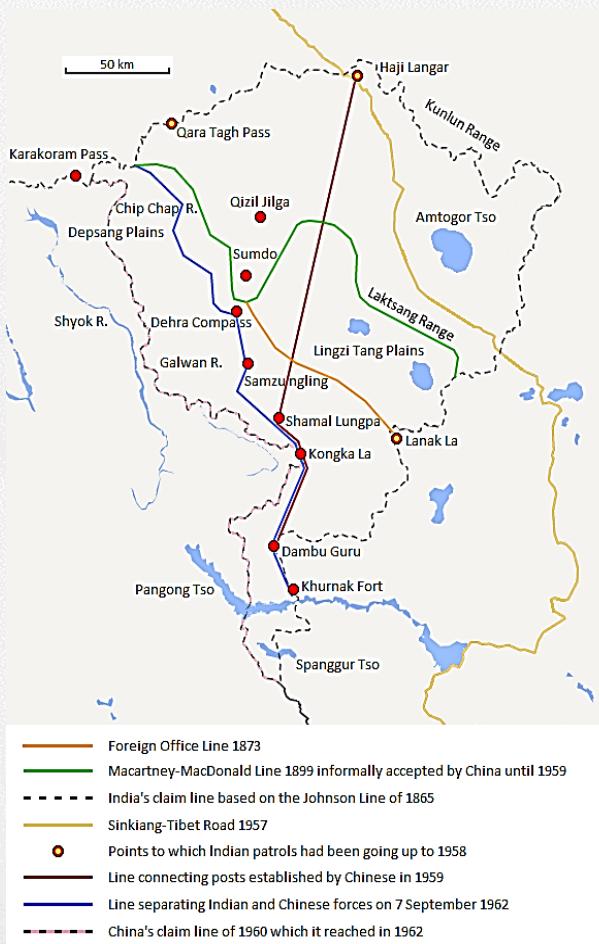
Maka berikut akan dibahas sejarah singkat kepelimikan 2 wilayah tersebut:

Wilayah Aksai Chin

Sejak tahun 1846 menyusul keberhasilan Inggris menaklukkan Konfederasi Sikh, Inggris berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh Konfederasi Sikh. Salah satu dari wilayah tersebut adalah Aksai Chin yang terletak di wilayah Kashmir utara dan timur. Inggris lalu berunding dengan China untuk memutuskan batas resmi antara kedua wilayah, namun perundingan tersebut gagal menentukan batas yang jelas mengenai Aksai Chin. Kendati demikian, sengketa atas Aksai Chin sendiri tidak pernah menjadi isu hangat antara kedua negara hingga beberapa tahun berikutnya.

Memasuki tahun 1865, perwakilan Inggris untuk Kashmir merancang garis perbatasan yang dikenal sebagai "Garis Johnson" di mana garis batas yang memisahkan China dan Kashmir tersebut memasukkan wilayah Aksai Chin sebagai bagian dari Kashmir. Pemimpin Kashmir menyambut baik keberadaan Garis Johnson tersebut, namun China menyatakan penolakannya dan enggan mengakui keberadaan Garis Johnson.

Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1899 Inggris yang membutuhkan China sebagai sekutu untuk membendung pengaruh Kekaisaran Rusia di utara memutuskan untuk menghilangkan keberadaan Garis Johnson dan membuat garis batas baru di mana kali ini, sebagian besar wilayah Aksai Chin dijadikan wilayah China.



Peta Wilayah Aksai Chin

Tahun 1911, timbul Revolusi Xinhai oleh panglima-panglima militer China yang mengakhiri era kekaisaran. Pasca revolusi tersebut, kondisi dalam negeri China dilanda ketidakstabilan dan raksasa Asia itu pun sempat tidak memiliki pemerintahan pusat yang jelas selama beberapa waktu. Inggris lantas mulai mengakui kembali keberadaan Garis Johnson sejak berakhirnya Perang Dunia I. Garis tersebut tetap menjadi salah satu batas resmi antara wilayah India kekuasaan Inggris dengan China hingga puluhan tahun berikutnya.

Ketika India mendapat kemerdekaan di tahun 1947, pemerintah baru India tetap menyatakan pengakuannya atas garis Johnson sebagai salah satu batas resmi antara India dan China. China sendiri masih cenderung bersikap adem ayem walaupun tetap enggan mengakui keberadaan Garis Johnson karena China ingin memelihara hubungan baik dengan India. Terutama karena India adalah salah satu negara pertama yang mengakui rezim komunis Republik Rakyat China (RRC) pasca perang sipil China yang berakhir di tahun 1949.

Namun memasuki tahun 1957, hubungan antara keduanya mulai menegang setelah di tahun tersebut India menemukan bahwa China secara diam-diam membangun jalan yang menghubungkan Aksai Chin dan Tibet selatan dengan provinsi Xinjiang, China. Dikombinasikan dengan kasus sengketa atas Garis McMahon dan pemberontakan yang timbul di Tibet beberapa tahun kemudian, ketegangan antara kedua negara pun semakin meningkat

Garis McMahon (Wilayah Tibet)

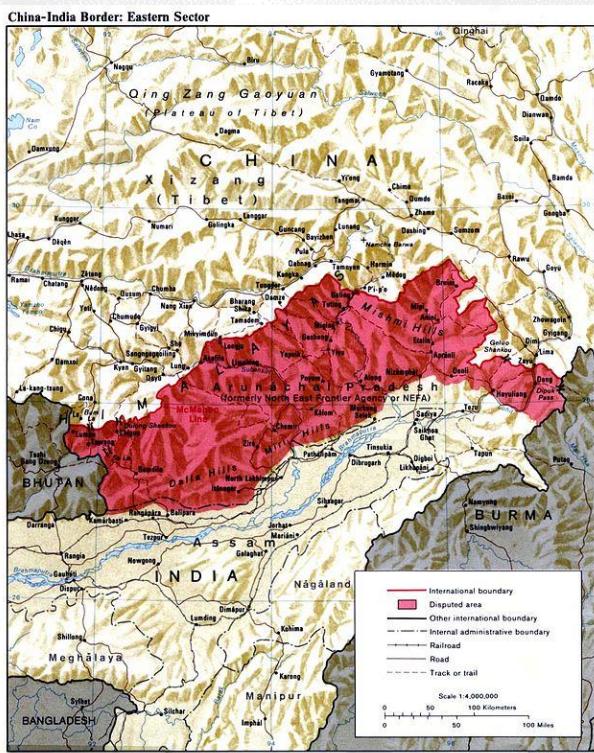
Tahun 1914, Tibet dan perwakilan Inggris yang menjajah India terlibat dalam perundingan yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bernama "Konvensi Simla" di mana konvensi tersebut menetapkan bahwa hanya sebagian wilayah Tibet yang berada di bawah kendali langsung dari China.

Tibet saat itu sebenarnya masih berstatus sebagai bagian dari China, namun pemerintah Tibet mengklaim dirinya sebagai negara merdeka dengan memanfaatkan situasi China yang sedang tidak stabil akibat perang sipil pasca Revolusi Xinhai. Perundingan yang menghasilkan Konvensi Simla juga tidak melibatkan China sehingga dalam perkembangannya, China selalu menolak mengakui keberadaan Konvensi Simla dan Garis McMahon. Tahun 1947, Inggris memerdekaan India dan pemerintahan baru India menganggap Garis McMahon sebagai salah satu batas resmi wilayahnya. Seperti halnya kasus sengketa Aksai Chin, China masih menunjukkan sikap pasif dalam kasus Garis McMahon ini karena walaupun tetap enggan mengakui keberadaan Garis McMahon, China tidak pernah menyinggungnya karena ingin tetap menjaga hubungan baiknya dengan India. Namun lagi-lagi seperti kasus sengketa Aksai Chin, hubungan antara kedua negara mulai memburuk ketika di tahun 1957, India menemukan jalan penghubung antara Aksai Chin dan Tibet selatan dengan provinsi Xinjiang yang secara diam-diam dibuat oleh China. Hubungan antara kedua negara semakin panas setelah di tahun 1959, sejumlah penduduk lokal Tibet melakukan pemberontakan untuk mengakhiri kekuasaan China atas Tibet.

Pemberontakan tersebut berakhir dengan kegagalan Dalai Lama ke-14 selaku pemimpin spiritual dari Tibet lalu melarikan diri ke India. Kemauan India untuk menampung Dalai Lama lantas mengundang kemarahan China sehingga buntutnya, hubungan antara kedua negara jadi semakin memanas dan tentara perbatasan kedua negara mulai sering terlibat baku tembak dalam skala kecil. Merasa bahwa konflik terbuka antara keduanya bakal terjadi dalam waktu dekat, masing-masing negara pun sejak tahun tersebut mulai menambah jumlah tentara dan persediaan logistiknya di perbatasan.

cepat ke wilayah India. Pihak India sama sekali tidak menyangka bahwa China akan melakukan serangan besar-besaran sehingga menjelang dimulainya perang, pasukan India tidak siap. Terkejut dengan serangan mendadak tersebut dan tidak bisa mengirimkan pesan ke luar medan perang untuk meminta bantuan, pasukan India yang ada di sana kemudian melarikan diri ke Bhutan, negara tetangga India di sebelah timur. Pasukan China memilih untuk melanjutkan penaklukannya ke wilayah-wilayah sengketa lainnya di India timur dan tidak mengejar pasukan India yang melarikan diri ke Bhutan. Tanggal 24 Oktober 1962, China yang sudah berhasil menguasai seluruh wilayah sengketa di kedua front lalu mengumumkan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut juga diikuti dengan tawaran dari pihak China yang menyatakan bahwa China akan menarik mundur pasukannya dari medan perang kalau India mau merundingkan kembali soal garis perbatasan di wilayah sengketa kedua negara. Tawaran tersebut ditolak India yang diikuti dengan pernyataan bahwa India akan mengerahkan kekuatan militernya secara penuh untuk mengusir China dari tanah India. India merasa berani mengeluarkan pernyataan tersebut karena di saat bersamaan, AS dan Inggris menyatakan dukungannya pada India.

Perang Fase II (November 1962). Tanggal 14 November 1962 atau 3 minggu setelah gencatan senjata pertama kali diumumkan, pertempuran kembali meletus di front timur. Dalam pertempuran tersebut, India yang melancarkan serangan besar-besaran ke kota Walong milik China, berhasil merebut kota tersebut dan membunuh sejumlah besar tentara China. Kemudian China meresponnya dengan melakukan serangan balik ke basis pertahanan India di dekat Se La pada tanggal 17 November 1962. Pasukan China sekali lagi menunjukkan kelihaiannya dalam memanfaatkan medan tempur. Alih-alih menyerang basis pertahanan India lewat jalan raya seperti yang diprediksi oleh India, pasukan China justru melancarkan serangan lewat jalan kecil di pegunungan dan berhasil membumi-hanguskan pasukan India yang ada di Se La.



Peta Wilayah Garis McMahon (Wilayah Tibet)



Peta garis batas sengketa Perbatasan China dan India

Perang China-India (1962) Pecah

Perang Fase I (Oktober 1962). Tanggal 20 Oktober 1962, pasukan China yang ada di front barat (Aksai Chin) dan front timur (China selatan) secara serentak melakukan serangan

Pertempuran yang kembali pecah di front timur lantas menjalar ke front barat. Pada tanggal 18 November 1962, pasukan China yang memanfaatkan gangguan jaringan komunikasi yang menimpa pasukan India dan kabut yang menyelimuti kawasan tersebut berhasil merebut Bukit Gurung dari tangan pasukan India setelah melalui pertempuran sengit selama 2 hari. Begitu sengitnya pertempuran tersebut sehingga sekitar 1.000 orang kembali China harus tewas dan terluka. India sendiri di lain pihak kehilangan 109 orang dari total 123 tentara yang ditugaskan untuk mempertahankan Bukit Gurung. Sejumlah tentara India yang selamat dari pertempuran tersebut lalu melarikan diri ke wilayah pegunungan yang lebih tinggi dan sempat meminta bantuan pengiriman pasukan tambahan karena khawatir pasukan China akan menerobos masuk ke wilayah India untuk mengejar mereka. Namun yang terjadi adalah China justru kembali mengumumkan gencatan senjata tak lama usai pertempuran di Bukit Gurung karena mereka merasa sudah berhasil merebut kembali wilayah-wilayah sengketa yang diklaim sebagai milik mereka. Dengan diumumkannya gencatan senjata tersebut, maka perang China-India yang sudah berlangsung selama 1 bulan pun berakhir.

Pasca perang, baik China maupun India juga sama-sama menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa di perbatasan lewat cara-cara damai. Hasilnya, India mengakui klaim China atas Tibet utara dan sebagian Kashmir (Aksai Chin), sementara China di lain pihak mengakui klaim India atas Tibet selatan (sekarang dikenal sebagai Provinsi Arunachal Pradesh, India).

Berdasarkan data dan fakta sejarah Perang China-India tahun 1962 yang telah diuraikan diatas maka dapat dianalisis terkait penyebab konflik tersebut. Menurut Ibnu Khaldun setidaknya ada tiga pilar utama yang harus mendapatkan perhatian yaitu: pertama, watak psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial diantara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku dan lainnya); kedua, adalah fenomena politik, yaitu berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti

dan negara; dan ketiga, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun negara.

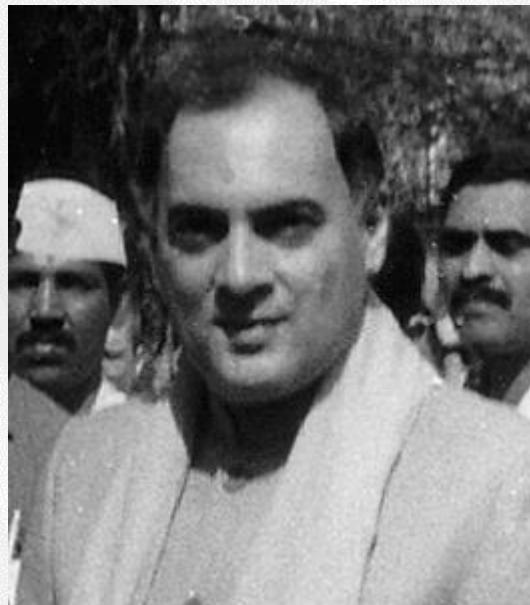
Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni, mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Selanjutnya yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentinganya. Tujuan konflik tersebut selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut.

Sedangkan yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Dalam konteks perang China-India 1962 adalah bentuk mempertahankan sumber-sumber yang menjadi wilayahnya, hal inilah yang menjadi penyebab pecahnya perang China-India tahun 1962.

Dalam pergaulan internasional, setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Tidak jarang ditemukan, kepentingan nasional suatu negara beriris dan bahkan berbenturan dengan kepentingan negara lain. Hal tersebut rentan mengantarkan negara tersebut dalam ketegangan dan terkadang berujung konflik. Negara menggunakan cara diplomasi untuk mengamankan atau meraih kepentingan nasionalnya.

Proses diplomasi bukan tidak ditempuh oleh pemerintah China dalam dalam penyelesaian konflik tersebut.

Pada April 1976, China dan India memutuskan untuk merevitalisasi hubungan diplomatik yang sempat kosong selama 15 tahun. Sebagai tanda bukti kedua negara secara simbolis mengirimkan duta besar untuk datang ke masing-masing negara. K. R Narayanan sebagai duta besar perwakilan dari India ke China dan Chen Chao Yuan sebagai duta besar perwakilan China ke India. Keputusan ini dipertegas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri India Atal Bihari Vajpayee ke China pada Februari 1979. Pada 23 Desember 1988, Perdana Menteri Rajiv Ghandi beserta para menterinya melakukan kunjungan guna penandatanganan perjanjian dan pembentukan *Joint Working Group* membahas optimalisasi kerja ahli militer dalam menjaga perdamaian dan ketenangan selama proses negosiasi di sepanjang garis LAC. Kemudian menjadi agenda pertemuan setiap tahunnya hingga tahun 1996.



Pada 23 Desember 1988, Perdana Menteri Rajiv Ghandi melakukan kunjungan ke China guna penandatanganan perjanjian dan pembentukan *Joint Working Group*

Namun hubungan bilateral antara kedua negara tidak mengalami kenaikan bahkan beberapa sektor mengalami penurunan pasca perjanjian 1993 dan 1996. Pertemuan ini juga menjadi penekanan terhadap keputusan China dan India membuka kembali jalur Ladakh, Kailash dan Mansarovar yang ditutup pasca konflik. Pada periode 2005-2017 diadakan 19 kali pertemuan Special Representative Meeting (SRM) antara lain membahas implementasi dan optimalisasi CBMs ke LAC,

pertukaran militer serta kerjasama bidang keamanan dan ekonomi. Pada tanggal 20 November 2006, politisi India dari Arunachal Pradesh menyatakan keprihatinan mereka atas modernisasi militer China dan meminta parlemen untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap RRC menyusul penumpukan militer di perbatasan yang serupa dengan yang terjadi pada tahun 1962. Selain itu, bantuan militer China ke Pakistan juga menjadi perhatian publik India, karena kedua belah pihak telah terlibat dalam berbagai perang.



Prajurit China dan India di perbatasan Wilayah Himalaya

Pada bulan Oktober 2011, dinyatakan bahwa India dan China akan merumuskan mekanisme perbatasan untuk menangani persepsi yang berbeda mengenai LAC dan melanjutkan latihan militer bilateral antara tentara India dan China mulai awal tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut maka langkah-langkah strategis kedua negara melalui diplomasi pertahanan yang soft power telah dilakukan namun tidak menurunkan ketegangan pasukan yang bertugas di perbatasan kedua negara.



Prajurit China dan India di perbatasan Wilayah Himalaya

Selanjutnya, terkait penyelesaian konflik perbatasan China-India ditinjau dari perspektif komunikasi persuasif, menurut Aristyavani (2017). Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Sementara Perloff mendefinisikan komunikasi persuasif sebagai proses simbolik dimana komunikator mencoba untuk meyakinkan orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka atas suatu isu melalui pengiriman pesan dalam situasi pilihan bebas. Diplomasi yang dilakukan cenderung membahas terkait hal-hal *prestige* suatu negara sehingga bukan menemukan solusi melainkan kebuntuan yang akhirnya membuat hubungan kedua negara memanas.

Oleh karena itu sejak pecahnya perang China-India (1962) berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa diperbatasan antar kedua negara yang hingga kini belum menemukan *win-win solution*. Faktor lainnya yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa batas kedua negara ditinjau dari faktor internal yang merupakan kekuatan yakni pertama, China dan India memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di dunia; kedua sama-sama merupakan negara besar di benua Asia; ketiga China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Sedangkan kelemahannya adalah **pertama**, prestige masing-masing negara sangat kuat; **kedua**, hubungan diplomatik kedua negara pasang-surut. Kemudian ditinjau dari faktor eksternal yang menjadi peluang adalah pertama, *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States*, 15 November 1982. Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB di dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. **Kedua**, India sebagai negara pertama yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan partai komunis China. Selanjutnya yang menjadi kendala/ancaman penyelesaian sengketa batas China-India antara lain pengaruh geopolitik dan geostrategi negara-negara kecil yang berada

diantara dua negara seperti Pakistan, Bhutan dan Nepal.

Penutup

Penyebab konflik China-India (1962) adalah perbedaan pandangan terkait batas-batas negara yang dibuat oleh saat India menjadi daerah kolonialisasi Inggris yang dikenal dengan Garis Johnson dan Garis McMahon. Upaya penyelesaian konflik China dan India telah dilakukan paska perang China-India (1962) pecah. Dengan dibentuknya *India China Joint Working Group on the boundary question*, adalah merupakan upaya penyelesaian sengketa batas negara dengan damai. Geopolitik dan geostrategi negara-negara kecil yang berada diantara dua negara seperti Pakistan, Bhutan dan Nepal mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Perkembangan ekonomi China yang begitu pesat menjadi alat bargaining dalam diplomasi luar negeri China.

Pelajaran yang dapat diambil (*Lesson Learned*) adalah selain diplomasi pertahanan sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan fisik, bangsa Indonesia perlu membangun kekuatan ekonomi yang kuat guna dijadikan posisi tawar dalam setiap pelaksanaan diplomasi dan negosiasi.

Akhir kata, perang antara China dan India yang terjadi pada tahun 1962 telah memberi gambaran kepada kita semua bahwa setiap negara adalah merupakan ancaman bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu jika mengharapkan kedamaian maka kita harus siap perang "*Si Vis Pacem, Para Belum*". Negara Indonesia harus melakukan "*Balance of Power*" yang dapat dijadikan sarana dalam melaksanakan diplomasi dan negosiasi.

Kompol Abdian Berkat Ndraja, S.H., S. I. K. adalah Abituren Akademi Kepolisian 2005, saat ini menjabat sebagai Danyon A Resimen 1 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri



SATU DEKADE PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA SURIAH UNTUK MENGHINDARI KEHANCURAN NEGARANYA

Major Czi Wahdha Andiar Wirahadi

Pendahuluan

Republik Arab Suriah (Suriah) adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat Asia tepatnya pada wilayah levant di Timur Tengah. Suriah memiliki luas wilayah 185.180 km² termasuk wilayah dataran tinggi Golan seluas 1.295 km yang saat ini diduduki secara illegal oleh Israel. Suriah berbatasan langsung dengan Turki di bagian utara, Irak di bagian timur, Laut Tengah dan Lebanon di bagian barat, serta Yordania dan Israel di bagian selatan¹. Kondisi geografis negara Suriah yang beriklim gurun yang berbatasan ataupun berdekatan dengan negara-negara yang sedang berkonflik keamanan, membuat negara ini tidak lepas dari konflik bersenjata dan perang saudara yang berkecamuk selama satu dekade terakhir. Suriah dibagi menjadi 14 kegubernuran, yang dibagi menjadi 61 distrik yang selanjutnya dibagi menjadi sub-distrik.

Deklarasi pendirian Federasi Demokratik Suriah Utara, yang merupakan sebuah wilayah otonom *de facto* yang terdiri dari tiga wilayah kanton yang memiliki pemerintahan sendiri di bagian utara Suriah meskipun otonom *de facto* yang tidak diakui oleh Republik Arab Suriah, menjadikan permasalahan tersendiri dari negara ini. Total area negara ini adalah 185.180 km yang diduduki oleh populasi 20.384.316 jiwa ditambah dengan 1,3 juta jiwa pengungsi dari Iraq dan 500.000 jiwa *stateless resident* dari Palestina³ membuat permasalahan Negara ini semakin kompleks.

Beberapa permasalahan yang melatar belakangi konflik bersenjata yang mengarah ke perang saudara di Suriah antara lain, **pertama**, kepemimpinan negara yang dipegang oleh presiden Bashar Al Ashad menggunakan gaya otoriter, represif dan lebih mengarah ke *dictatorship* dalam menjalankan kekuasaan politisnya. Kepemimpinannya yang otoriter dimulai ketika Arab Spring atau pemberontakan warga di musim semi masuk Suriah.

Upayanya mereformasi Suriah pupus akibat gerakan anti pemerintahan Bashar Al Ashad. Panglima tertinggi angkatan bersenjata Suriah itu merespons pemberontakan dengan memerintahkan aparat untuk menangani pengunjuk rasa secara brutal dan represif, karena pengunjuk rasa dilabel sebagai "teroris" negara.

Kedua, adanya isu *Arab Spring* yang berawal dari demonstrasi saat musim semi di Tunisia yang berhasil menumbangkan presiden Tunisia, Ben Ali untuk mundur akibat rezim yang diktator-otoriter.

Gerakan yang dianggap revolusi untuk menumbangkan pemimpin yang diktator dan otoriter tersebut menyebar luas hingga Mesir yang berhasil menumbangkan kekuasaan Hosni Mubaraq, diikuti Yaman yang berhasil menumbangkan Ali Abdallah Saleh dan di Libya yang berhasil menumbangkan Moamar Qadafi. Isu *Arab Spring* ini juga menginspirasi gerakan perubahan di Suriah untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Bashar al Ashad yang dianggap otoriter dan tidak berhasil memimpin

Suriah dalam masa 21 tahun karena pengangguran di Suriah mencapai 50% dari penduduk yang menyebabkan 80% warga negara Suriah hidup dalam kemiskinan dan 60% diantaranya mengalami kelaparan akibat menurunnya nilai mata uang *Pond* Suriah sebesar 80% dan kelangkaan bahan pangan.



Presiden Bashar al Ashad

Ketiga, adanya negara-negara yang terlibat langsung pada konflik Suriah menjadikan konflik bersenjata dan perang saudara yang terjadi semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan, di mana kelompok berkuasa dibantu oleh Rusia di lain pihak, oposisi didukung oleh Turki. Selain itu, adanya non-state actors yang terlibat dalam konflik seperti Hizbullah dan Milisi Kurdi membuat posisi semakin rumit. AS, memposisikan diri tidak terlibat langsung dalam konflik Suriah, namun upaya AS memerangi ISIS yang memanfaatkan konflik di Suriah, membuat AS terlibat secara tidak langsung dalam konflik yang terjadi.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik beberapa persoalan yang dialami oleh Suriah terkait konflik bersenjata dan perang saudara yaitu: pertama, konflik bersenjata yang berkembang menjadi perang saudara; kedua, kehancuran ekonomi dan infrastruktur negara akibat konflik menjadikan negara ke dalam resesi yang parah; ketiga, hilangnya kewibawaan negara menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif dan keempat, banyaknya korban akibat perang. Mengacu pada beberapa persoalan mendasar tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimana strategi Suriah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi untuk menghindari kehancuran negaranya.

Menelaah konflik yang terjadi di Suriah ini penting dilakukan guna mendapatkan lesson learned terkait penyebab konflik dan upaya strategi penyelesaian untuk menghindari kehancuran negara. Maksud dari tulisan ini adalah sebagai gambaran konflik yang terjadi di Suriah, apa penyebabnya, bagaimana jalannya konflik dan upaya penyelesaian sebagai upaya pembelajaran untuk menghindari hal serupa terjadi di Indonesia, sedangkan tujuannya adalah sebagai sumbangan ide dalam rangka mengatasi konflik yang terjadi di Indonesia agar tidak menjadi konflik bersenjata seperti di Suriah.



Peta Wilayah Suriah

Timeline Konflik bersenjata berujung Perang Saudara

Pada tanggal 16 Maret 2011, pergolakan mulai pecah setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama *“Day of Dignity”* di Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Di Deraa, sebuah kota di dekat perbatasan Yordania, pasukan keamanan menembak dan membunuh sejumlah demonstran yang tergabung dalam demonstrasi yang diberi nama *“Day of Dignity”*. Pada tanggal 27 Maret 2011, pasukan Suriah secara membabi buta menembaki ratusan demonstran yang menyerukan pencabutan undang-undang darurat. Sejumlah 16 orang dilaporkan tewas pada hari itu. Menurut data resmi PBB lebih dari 10.000 tewas. Inilah bentuk kebrutalan tentara Suriah yang menggempur Houla dengan menggunakan tank dan tembakan artileri. Dewan Keamanan PBB mengecam keras penggunaan senjata berat di Houla. Menurut Whitson, tidak cukup jika PBB mengecam tanpa aksi nyata. Menurutnya Dewan Keamanan (DK) PBB harus mengusut kasus ini dan menindak tegas pelakunya.

Pada tahun 2012, gelombang demonstrasi yang menuntut turunnya Bashar Al Ashad semakin besar karena perkembangan internet serta teknologi komunikasi yang membuat arus informasi dari media sosial cukup kuat dan membuat situasi politik semakin memanas. Presiden Bashar Al Ashad menginstruksikan kepada Militer dan polisi untuk menghalalkan segala cara untuk menghalau aksi protes masyarakat sehingga memunculkan polarisasi dua kubu, yakni kubu pro-pemerintah dan kubu revolusioner yang oposisi. Pada tahun 2014, muncul kelompok oposisi baru yaitu ISIS dan Jabhat al-Nushrah dengan memanfaatkan kondisi politik dan keamanan negara Suriah, yang berupaya untuk mendirikan negara Islam di Suriah dengan melakukan teror kepada masyarakat dan pemerintahan Suriah dan berhasil menguasai 70% wilayah Suriah.



Tahun 2014, muncul kelompok ISIS Suriah

Pada tahun 17 Maret 2016, memanfaatkan situasi negara yang kacau dan pemerintahan yang tidak berjalan efektif, suatu gerakan kemerdekaan yang mayoritas etnis Kurdi dan Turkmen yang merupakan keturunan Turki, mendeklarasikan kemerdekaan wilayah yang disebut Federasi Suriah Utara atau Rojava yang berpaham sekuler dan mengklaim menguasai 27,73% wilayah Suriah Utara – Timur yang didukung oleh sayap militer yang disebut *Syrian Democratic Forces* (SDF) yang didukung AS, Perancis, Inggris, UEA, Arab Saudi dan Italia.⁶ Pada tahun 2018, kepemimpinan Bashar Al Ashad tetap tidak tergoyahkan akibat dukungan Rusia dan Iran yang didukung penjagaan milisi Shabiha yang kebal hukum serta dukungan milisi Hizbulah yang berbasis di Iran dan Lebanon yang menginginkan

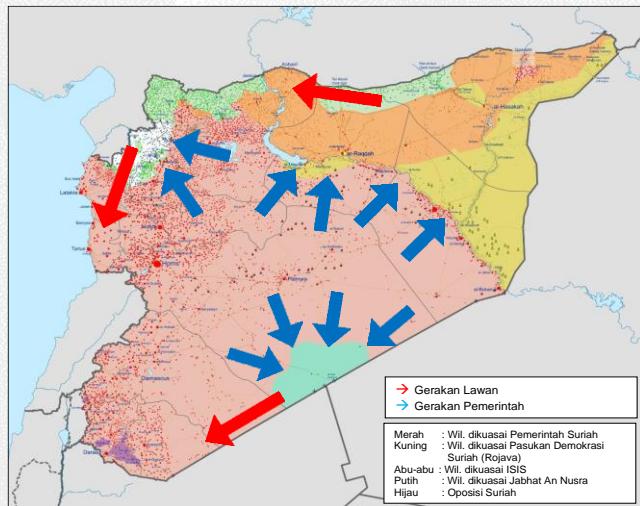
turunnya Presiden Bashar yang di inisiasi oleh pasukan Kurdi yang dibantu oleh Turki. Hingga saat ini, kemampuan pemerintah Bashar Al Ashad dalam menguasai wilayah setelah pasukan koalisi Pemerintah didukung Rusia melakukan perang di provinsi Idlib yang memaksa hampir satu juta warga negara Suriah, mengungsi.

Mengacu pada perkembangan konflik dari awal mula konflik di Suriah, beberapa pihak yang bersengketa dalam konflik bersenjata cukup dinamis dan kompleks. Pihak pihak tersebut meliputi : **Pertama**, kubu pro-pemerintah yang didukung oleh Rusia dan Iran, yang meliputi Pemerintah Suriah dipimpin Presiden Bashar Al Ashad yang terdiri dari 1) Angkatan bersenjata Suriah, 2) Angkatan Pertahanan Nasional, 3) Brigade Baath, 4) Grup milisi Shabiha, 5) Hisbullah. **Kedua**, kubu Revolusioner/oposisi yang meliputi, 1) Kelompok ISIS (memperjuangkan negara Islam), 2) Kelompok SRCC (Dewan Komando Revolusioner di Suriah) yang berafiliasi dengan Al Qaeda, 3) Jabhat Al Nusra (menginduk ke Al Qaeda) dan front perjuangan afiliasinya. **Ketiga**, kubu sekuler oposisi pemerintahan Bashar Al Ashad yang bertujuan untuk menghadapi ISIS untuk mendirikan negara ISIS dengan memanfaatkan konflik di Suriah, yang ingin merdeka dibawah Federasi Suriah Utara atau Rojava yang didukung oleh AS, Perancis, Inggris, UEA, Arab Saudi dan Italia, yang meliputi, 1) *Syrian Democratic Forces* (SDF), 2) Koalisi Arab-Suriah, 3) YPG (Satuan Pelindung Rakyat), 4) YPJ (Satuan Perlindungan Perempuan), 4) MFC (*Syrian Military Council*). **Keempat**, kubu Oposisi Suriah yang membentuk Tentara Pembebasan Suriah yang menguasai daerah penting Aleppo.



MFC (*Syrian Military Council*)

Dalam konflik multi-dimensi dan multi-etnis yang terjadi di Suriah, akan sulit untuk dikategorikan dalam perang konvensional karena konflik bersenjata tersebut merupakan salah satu bentuk assymetrical warfare dan salah satu bentuk Perang Proksi (*Proxy War*). Dalam penggambaran perang pengaruh dan penguasaan wilayah adalah sesuai gambar berikut :



Penguasaan Wilayah oleh kubu yang bertikai di Suriah

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa, Pemerintah Suriah menguasai 64,24% wilayah, ISIS menguasai 0,73%, Jabhat An Nusra menguasai 9,7% dan 27,34% dikuasai oleh Kurdi dalam Federasi Suriah Utara atau Rojava.⁷ Melihat banyaknya kepentingan yang melibatkan diri dalam konflik Suriah dan wilayah yang dikuasai oleh pemerintah yang semakin mengecil menandakan penyelesaian oleh negara menjadi sulit dan kekuatan lawan juga tidak dapat diketahui karena banyaknya negara kuat yang mendukung kekuatan lawan negara secara proxy akan mengakibatkan upaya negara untuk mengatasi konflik menjadi semakin kompleks dan rumit.

Dampak akibat Perang/Konflik Bersenjata.

Konflik bersenjata di Suriah berawal kejadian grafiti yang dibuat oleh sekelompok pemuda yang menuliskan bahwa Rezim harus berakhir seperti negara yang Mesir, Libya dan Yaman yang berujung pada penahanan dan penyiksaan. Tindakan represif tersebut memicu demonstrasi yang dilakukan oleh warga negara Suriah pada 11 Maret 2011 yang memprotes penyiksaan atas pelaku protes yang membuat coretan di tembok kota Daraa.

Gelombang protes menjadi berkembang akibat adanya isu Arab Spring yang berhasil menumbangkan diktator di Mesir, Libya dan Yaman serta memprotes turunnya Presiden Bashar Al Assad, karena dianggap tidak mampu mengubah kondisi ekonomi dan kemiskinan di Suriah selama masa jabatannya. Selain itu, gaya hidup hedonisme dari Istri Presiden Bashar di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan rakyat Suriah, semakin membuat antipati gerakan oposisi untuk menurunkan Presiden Bashar dan menggelar Pemilu yang adil di Suriah.

Dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata dan perang saudara yang berkepanjangan ini antara lain, pertama, Konflik yang telah berjalan selama satu dekade ini telah menewaskan lebih dari 388.000 jiwa yang terdiri dari 117.388 warga sipil, 22.000 jiwa korban wanita dan anak-anak serta membuat lebih dari 900.000 orang mengungsi ke negara perbatasan, yakni Lebanon dan Yordania serta Turki.

Pertempuran yang terjadi di wilayah Idlib, antara pemberontak yang dibantu Turki dengan Tentara Suriah yang dibantu Rusia yang mengakibatkan lebih dari 1,5 juta penduduk Idlib mengungsi dan meninggalkan daerahnya.⁸ PBB menyuarakan bahwa krisis di Suriah merupakan suatu krisis kemanusian yang berkepanjangan. Upaya internasional dalam menghentikan konflik bersenjata di Suriah sangat diperlukan guna menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi.

Kedua, Pemerintahan Bashar Al Ashad telah gagal dalam menjalankan fungsi pemerintahan dilihat dari kegagalan negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi warganya. Kegagalan ini juga menurunkan kepercayaan dunia internasional atas upaya penyelesaian konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan di Suriah.

Ketiga, Pemerintah Suriah juga dianggap telah gagal menjalankan fungsi negaranya dalam bidang stabilitas ekonomi dan penyediaan kecukupan bahan kebutuhan primer warganya. Hal ini dapat dinilai dari Rasio Gini Suriah di angka 55,8 yang berarti ketimpangan ekonomi antar penduduk tinggi. Selama satu dekade perang saudara, ekonomi Suriah terkontraksi 70% dimana mata uangnya

kehilangan hampir 80% nilainya. Pendapatan negara menurun akibat serangan ISIS pada wilayah sumber minyak bumi karena 40% pendapatan negara berasal dari minyak bumi. Keempat, Satu dekade perang di Suriah telah mengakibatkan hancurnya 83% jaringan listrik negara dan sebagian besar infrastruktur vital khususnya yang berada di daerah yang dikuasai oleh pihak oposisi maupun pihak lawan negara.

Upaya Negara dalam Penyelesaian Konflik

Melihat kompleksitas permasalahan konflik bersenjata di Suriah dengan keterlibatan state actor berupa negara Rusia dan Iran sebagai pendukung pemerintahan Bashar berhadapan dengan Oposisi yang terdiri dari oposisi yang bersifat religius dan sekuler, salah satunya di dukung oleh negara-negara AS, Perancis, Inggris, UEA, Arab Saudi dan Italia yang memainkan perang proxy, akan lebih sulit bagi negara dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan konfliknya, namun konflik ini harus dapat diselesaikan guna mempertahankan eksistensi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Dalam menelaah upaya yang diambil oleh negara Suriah dalam menyelesaikan Konflik negaranya harus terlebih dahulu melihat faktor-faktor yang berpengaruh yang berupa faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Dari faktor kekuatan dapat diidentifikasi berupa, pertama, warga negara yang mendukung pemerintahan masih cukup besar. Hal ini dilihat dari hasil pemilu yang dilaksanakan tanggal 26 Mei 2021 yang memenangkan Bashar Al Ashad sebanyak 95% meskipun prosesnya banyak dikecam oleh dunia internasional. Kedua, kekuatan militer aktif dan cadangan dibanding warga negara cukup besar yakni 1,27% dengan 225.000 orang. Hal ini dapat dijadikan modal dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan kewibawaan pemerintah.

Sedangkan dari faktor kelemahan juga dapat diidentifikasi sebagai berikut : pertama, Kewibawaan pemerintah yang menurun akibat beberapa kegagalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan akibat konflik yang berkepanjangan.

Kedua, faktor kesetiaan kepada negara dari personel angkatan bersenjatanya masih belum optimal karena masih ada puluhan ribu personel militer belum kembali ke kesatuan dan dianggap desersi. Ditinjau dari faktor eksternal, yang meliputi peluang yang terdiri dari pertama, adanya dukungan dari Rusia sebagai negara besar dan memiliki kekuatan veto di PBB dan kedua, Suriah masih menjadi anggota PBB yang memiliki hak yang sama dengan negara-negara untuk memanfaatkan organisasi Internasional, ketiga, Suriah juga tergabung dalam anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).



Demontran Warga OKI untuk penyelesaian Konflik Suriah

Selain itu, juga ada kendala yang dihadapi Suriah antara lain, pertama, negara-negara Arab tidak solid membantu upaya penyelesaian konflik melalui diplomasi dan dialog tapi menggunakan proxy untuk tujuan politis. Kedua, Adanya dukungan negara barat kepada pihak oposisi sehingga mampu mendirikan Wilayah Autonomi Suriah Utara-Timur atau yang disebut Rojava yang mengarah kepada deklarasi kemerdekaan meski tidak diakui eksistensinya oleh dunia internasional.



Demontran di Suriah desak PBB turun tangan

Mengacu pada faktor-faktor yang berpengaruh baik dari dalam maupun dari luar, dapat diformulasikan beberapa upaya penyelesaian konflik di suriah meliputi

Pertama, melakukan penyekatan di daerah-daerah yang dikuasai oposisi agar tidak meluas dengan menggunakan kekuatan militer efektif dengan tetap berpedoman pada hukum internasional dan humaniter yang berlaku (S-O).

Kedua, melakukan dialog dengan faksi-faksi yang bertikai dengan pemerintah untuk berupaya menghentikan kekerasan dengan menegakkan hukum secara proporsional (S-O).

Ketiga, Memberikan amnesti kepada personel angkatan perang yang masih ingin bergabung dengan persyaratan harus berikrar setia kepada negara untuk meghindari memperkuat pihak lawan (W-T),

Keempat, menggunakan peluang sebagai anggota PBB untuk membantu penyelesaian konflik melalui mekanisme organisasi internasional sehingga dapat membuka potensi adanya perhatian dunia internasional untuk menekan negara-negara luar untuk tidak turut campur dalam konflik yang terjadi (W-O).

Kelima, pemerintah merubah image yang tersematkan (otoriter, represif dan diktator) dengan mengubah tindakan di lapangan yang humanisme, mengubah undang-undang yang lebih demokratis dan melaksanakan proyek-proyek kemanusiaan di daerah-daerah yang terdampak akibat konflik khususnya didekat wilayah yang diduduki pihak lawan untuk menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya dan berupaya untuk mengubah image negatif kepemimpinan.

Keenam, memanfaatkan Organisasi Islam untuk sebagai sarana dialog dan diplomasi untuk mencari langkah penyelesaian konflik dan mendapatkan dukungan yang solid dari negara-negara Arab (S-T).

Dalam upaya penyelesaian konflik di Suriah, tidak seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan efektif diterapkan di lapangan, beberapa yang kurang dapat diaplikasikan di lapangan antara lain.

Pertama, pemimpin negara memiliki ego pribadi dan keinginan untuk berkuasa selama

mungkin membuat proses perubahan *image* pemimpin negara yang dapat merangkul semua pihak menjadi sulit.

Kedua, negara-negara yang terlibat dalam konflik negara Suriah tidak dapat menahan diri untuk tidak terlibat lebih jauh dalam konflik.



Kekuatan Kurdi bekerjasama dengan pasukan Amerika untuk menjaga fasilitas produksi minyak di Suriah utara.

Ketiga, sentimen agama (isu Syiah-Sunni) yang membuat hubungan antar negara-negara Arab tidak solid dalam mendukung proses penyelesaian konflik Suriah.

Keempat, Peran Organisasi Konferensi Islam sebagai wadah dialog dan diplomasi terkait negara-negara anggota tidak berjalan dengan efektif.



Konferensi Istanbul 1 maret 2018 Mengevaluasi Semua Aspek Perang Suriah

Kelima, fungsi yudikatif dan pengawasan legislatif belum berjalan dengan optimal sehingga mengakibatkan proses penyelenggaraan pemerintahan mutlak berada di tangan penguasa tanpa adanya pengawasan yang setara.

Lesson Learned / Pembelajaran

Penelaahan atas perang atau konflik bersenjata yang terjadi di Suriah adalah penting untuk dilakukan mengingat konflik terjadi disebabkan oleh hal-hal yang sepele namun ditanggapi dengan berlebihan dan tidak proporsional sehingga berakibat menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan dan perang sipil atau perang saudara.

Beberapa lesson learned atau pembelajaran yang dapat diambil dari hasil penelaahan konflik bersenjata di Suriah antara lain, pertama, bahwa negara yang kuat harus didukung intelijen yang kuat pula. Kemampuan intelijen ini penting sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pimpinan negara dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi potensi konflik. Jika analisa intelijen terhadap suatu konflik tidak valid maka penanganan yang akan diambil oleh pemerintah juga akan tidak efektif dan konflik berpotensi menjadi tindakan teror atau bahkan menjadi tindakan makar yang membahayakan kedaulatan negara.

Kemampuan intelijen ini juga harus bisa menganalisa kemungkinan pelibatan negara-negara lain dalam konflik sehingga pemerintah dapat menggunakan jalur diplomasi untuk mencegah pelibatan negara-negara lain dalam konflik internal negara. Kedua, Diktatorisme dan Otoritarianisme adalah babit dari konflik jika tidak dikelola dengan baik. Banyak negara yang menjadi hancur, tumbangnya pemimpin negara dan kehancuran ekonomi akibat dari tindakan pemimpin negara yang mempraktekkan politik secara diktator dan otoriter, apalagi ditambah dengan pelemahan fungsi yudikatif dan pengawasan legislatif, akan membuat pemimpin negara menjadi aktor tunggal yang keputusannya tidak terbantahkan yang pada akhirnya membentuk suatu kultus individu.

Jika penduduk negara tersebut bersifat homogen mungkin tidak terlalu berpengaruh, namun jika homogenitas demografi cukup tinggi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan yang mengarah kepada polarisasi yang berpotensi menimbulkan tindakan teror atau disintegrasi bangsa. Ketiga, masalah kemiskinan, masalah sosial dan kelangkaan pangan juga berpotensi menjadi ladang subur

timbulnya babit-babit organisasi teror baik yang berbasis agama maupun politik yang bertujuan untuk melakukan tindakan revolusi (menggulingkan penguasa negara yang tidak sejalan). Kemiskinan tidak akan pernah dapat dihapuskan, namun yang dituntut adalah kehadiran negara dalam upaya mengatasi kemiskinan dan masalah sosial dengan imbang dan proporsional (tidak memihak) sehingga polarisasi dapat dieliminir. Keempat, pemerintah atau negara wajib menganalisa dan menyelesaikan setiap konflik secara proporsional dengan pendekatan soft power hingga tuntas untuk menghindari timbulnya potensi berkembangnya konflik menjadi tindakan teror atau upaya disinterasi bangsa.

Penutup

Dari tulisan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa konflik bersenjata di Suriah dilatarbelakangi adanya isu Arab Spring yang bertujuan untuk menggulingkan pemimpin negara yang diktator dan otoriter dan diawali dengan hal sepele, namun karena adanya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan serta pengangguran, mengakibatkan demonstrasi damai menjadi konflik bersenjata yang melibatkan negara-negara lain terlibat di dalamnya. Pihak yang bersengketa di konflik Suriah terdiri dari Pemerintah Suriah berhadapan dengan kelompok milisi bersenjata (*Non-state actors*) yang di *back-up* oleh negara besar (*State-Actors*) dengan agenda tertentu. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa, kehancuran infrastruktur negara, kehancuran ekonomi serta menurunnya wibawa pemerintah. Upaya negara untuk mengatasi konflik didasari pada faktor yang berpengaruh belum efektif dijalankan oleh negara karena masih adanya pemerintah yang tetap ingin status quo berlaku di Suriah, sehingga peran komunitas internasional sangat diperlukan guna menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah serta menghentikan krisis kemanusiaan.

Mayor Czi Wahdha Andiar Wirahadi adalah abituren Akademi Militer tahun 2002 saat ini menjadi Pasis Dikreg LXI Seskoad TA 2021. Jabatan saat ini adalah Kasimin Bagpers Subditperslog Sdirum Pusziad.



PERANG PERU VS EKUADOR DALAM PEREBUTAN WILAYAH PERBATASAN

Major Caj R. Prabu Kandihawa, S. Sn.

Pendahuluan

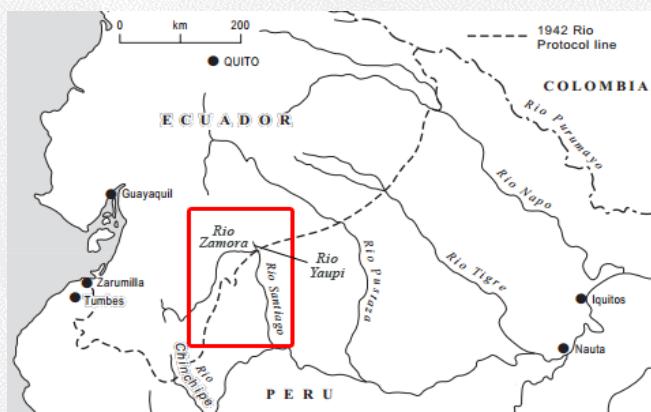
Peru adalah salah satu negara yang berada di bagian barat Amerika Selatan. Negara ini mungkin masih asing bagi sebagian orang karena tidak banyak berita dan informasi yang diterima dari negara ini. Peru diyakini merupakan asal dari suku Inca yang sangat terkenal sebagai salah satu budaya dan peradaban kuno, salah satu situs bersejarahnya yang bisa dilihat saat ini adalah Machu Pichu, sebuah piramida kuno yang terbuat dari batu yang menandakan kemajuan peradaban manusia pada masa itu. Peru secara tradisional digambarkan dalam tiga wilayah memanjang yang luas: Costa yang gersang di barat; sistem Sierra, atau Andes yang kokoh di tengah; dan Amazonia yang basah dan berhutan—Daerah Amazon tropis—di timur.

Secara geografis, Negara Peru memiliki perbatasan dengan Kolombia di timur laut dan Brasil di timur melintasi dataran rendah atau hutan tropis, sedangkan perbatasan dengan Bolivia di tenggara, Chili di selatan, dan Ekuador di barat laut melintasi pegunungan Andes. Terhadap sengketa wilayah perbatasan, Peru pernah berkonfrontasi dengan Ekuador terkait perebutan wilayah perbatasan dengan Ekuador. Perselisihan antara Ekuador dan Peru berawal dari tahun 1840. Perselisihan itu berkisar pada apakah wilayah Ekuador meluas

melampaui pegunungan Andes hingga sungai Marañon (Amazon), termasuk lembah Amazon yang dulunya merupakan bagian dari Gran Colombia³. Peru mengklaim wilayah tersebut berdasarkan hasil dari perjanjian Gual-Larrea yang dibuat oleh Peru dan Gran Colombia pada tanggal 22 September 1829, namun pada tahun 1887 Ekuador memiliki pandangan yang berbeda dan meragukan keabsahan dari isi perjanjian tersebut apalagi secara administratif negara Gran Colombia telah resmi dibubarkan pada tahun 1931. Hal ini yang kemudian memicu ketegangan diantara negara Peru dan Ekuador. Konflik-konflik kecil antara kedua negara mulai sering terjadi di wilayah tersebut yang berlanjut pada terjadinya perang terbuka dengan melibatkan kekuatan militer dari kedua negara.

Perang Ekuador–Peru, yang secara lokal dikenal sebagai Perang '41 (Guerra del 41), adalah perang perbatasan Amerika Selatan yang terjadi antara tanggal 5 sampai dengan 31 Juli 1941. Hal tersebut merupakan yang pertama dari tiga konflik militer antara Ekuador dan Peru selama abad ke-20. Selama perang, Peru menduduki provinsi El Oro di Ekuador barat dan sebagian provinsi Loja di Andes. Meskipun perang terjadi selama Perang Dunia II, namun tidak terkait dengan konflik tersebut; baik Ekuador maupun Peru tidak didukung oleh Sekutu atau Blok Poros⁴. Kontak senjata berakhir setelah ditandanya perjanjian gencatan

senjata antara kedua negara yang mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1941. Perang '41 berakhir dengan kemenangan oleh pihak negara Peru.



Wilayah Perang, Peru Vs Ekuador Dalam Perebutan Wilayah Perbatasan

Dari uraian di atas, terdapat beberapa pokok persoalan yaitu : Pertama, Apa latar belakang sejarah terjadinya perang di negara tersebut? Kedua, Bagaimana perang yang terjadi di negara tersebut dihadapkan dengan teori perang? Ketiga, Bagaimana pergerakan Pasukan yang terlibat dalam perang tersebut? Keempat, Bagaimana Taktik perang yang digunakan? Kelima, Dampak yang ditimbulkan akibat perang tersebut? Dan Keenam, Pelajaran apa yang dapat diambil? Dari beberapa persoalan diatas, maka didapatkan rumusan judul esai "**UPAYA MEMENANGKAN PERANG PERU MELAWAN EKUADOR DALAM PEREBUTAN WILAYAH PERBATASAN**". Memperjelas pembahasan dalam esai ini akan dilampirkan peta/daerah pertempuran tersebut disertai tanda taktis militer untuk memberikan pemahaman kepada pembaca.

Penulisan esai menggunakan metode deskriptif analisis dari berbagai data dan fakta yang ada serta didukung dengan pendekatan studi kepustakaan. Selanjutnya data dan fakta akan dianalisis dengan analisis SWOT sehingga tulisan ini akan memberikan lesson learned (proses pembelajaran) bagi penulis dan pembaca. Penulisan esai ini disusun meliputi Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup.

Pembahasan.

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi perrusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan⁵. Salah satu alasan terjadinya perang yang paling sering terjadi dalam sejarah adalah perebutan wilayah. Penguasaan atas suatu wilayah seringkali dimaknai sebagai wujud eksistensi suatu bangsa. Hal ini mengerucut pada satu kesimpulan yang seakan disepakati bersama bahwa semakin luas suatu wilayah maka pengakuan atas eksistensi bangsa tersebut semakin tinggi. Hal ini jugalah yang telah memicu pemimpin-pemimpin dunia untuk selalu berusaha menaklukkan dan menguasai suatu wilayah dari bangsa lain. Meskipun diluar eksistensi terdapat juga latar belakang sejarah, politis, dan ekonomi kenapa perang perebutan wilayah itu terjadi sebagaimana yang terjadi dalam Perang '41 yang melibatkan Peru dan Ekuador dalam memperebutkan wilayah di daerah bekas negara Gran Colombia.

Latar Belakang Sejarah Terjadinya Perang.

Pada awal tahun 1829, Peru berperang melawan Gran Colombia untuk mempertahankan wilayah yang secara tradisional merupakan bagian dari wilayah Peru. Perang berakhir setelah adanya Perjanjian Gual-Larrea ditandatangani pada 22 September 1829 yang memutuskan bahwa Peru berhak atas wilayah yang disengketakan. Pada tahun 1887, Parlemen Ekuador membantah keabsahan dokumen perjanjian Gual-Larrea dan menyatakan bahwa wilayah Zarumilla hingga lembah sungai Putumayo



Wilayah Perang, Peru Vs Ekuador Dalam Perebutan Wilayah Perbatasan

yang saat itu berada di bawah penguasaan Peru adalah merupakan wilayah dari Ekuador. Klaim yang dilakukan oleh Ekuador berdasarkan atas isi dari Perjanjian Protokol Pedemonte-Mosquera yang ditandatangani pada tahun 1830 sebagai kelanjutan dari Perjanjian Gual-Larrea.

Klaim Ekuador tersebut mendapat penolakan dari negara Peru karena secara historis, masyarakat yang tinggal di zona sengketa di wilayah Zarumilla dan lembah sungai Putumayo adalah warga keturunan dari bangsa Inca sebagai penduduk asli bangsa Peru. Selain itu, Peru juga menantang Ekuador untuk membuka dan menunjukkan naskah asli dari Protokol Pedemonte-Mosquera yang menjadi dasar atas klaim Ekuador, namun Ekuador gagal memenuhi permintaan tersebut.

Pada tahun 1887, upaya mencari jalan tengah yang damai dilakukan dengan bantuan dari kerajaan Spanyol sebagai arbiter akan tetapi antara Peru dan Ekuador gagal mencapai kesepakatan.



Pasukan Darat Peru dan warga keturunan Inca
11 Januari 1941

Ekuador menarik diri dari proses yang sedang berjalan dan mengambil inisiatif untuk menambah jumlah kekuatan militer secara bertahap di zona sengketa. Pada, menuju bahwa orang Ekuador telah melancarkan serangan dan bahkan pendudukan di wilayah Peru di Zarumilla, presiden Peru saat itu, Manuel Prado, memerintahkan pembentukan Komando Kelompok Utara, sebuah unit militer yang bertanggung jawab atas Teritori Operasional Utara.

Dengan semakin banyaknya pasukan militer kedua negara di zona sengketa, potensi terjadinya perang semakin terbuka lebar.

Terjadinya Perang Sesuai Teori Perang.

Tidak diketahui secara pasti mengenai siapa yang pertama kali memantik terjadinya perang, namun bentrokan pertama terjadi pada hari Sabtu, 5 Juli 1941. Menurut versi Peru, pasukan Ekuador menyerbu wilayah Peru di provinsi Zarumilla, yang memulai pertempuran yang menyebar ke zona yang dikenal sebagai Quebrada Seca (sungai kering). Beberapa pasukan Ekuador dari garnisun Huaquillas, sebuah kota di tepi sungai Zarumilla, menyeberang ke pos perbatasan Peru di Aguas Verdes, sebuah kota tepat di depan Huaquillas, dan menembaki patroli Peru. Pasukan ini kemudian diikuti oleh sekitar 200 pria bersenjata Ekuador, yang menyerang kantor polisi di Aguas Verdes, yang ditanggapi oleh Peru dengan mengirimkan kompi infanteri ke Aguas Verdes dan memukul mundur pasukan Ekuador melintasi Zarumilla. Pertempuran kemudian menyebar ke seluruh wilayah perbatasan di sepanjang sungai Zarumilla. Pada tanggal 6 Juli, penerbangan Peru melakukan serangan udara terhadap pos perbatasan Ekuador di sepanjang sungai. Tetapi versi Ekuador adalah bahwa Peru mengambil serangkaian insiden antara patroli perbatasan sebagai dalih untuk menyerang Ekuador. Menurut Kolonel Luis A. Rodríguez, komandan pasukan Ekuador yang membela provinsi El Oro selama perang, insiden 5 Juli 1941 dimulai ketika patroli perbatasan Ekuador menemukan beberapa warga sipil

Peru, dilindungi oleh polisi, membersihkan sebidang tanah di sisi sungai Ekuador. Setelah melihat patroli, polisi Peru melepaskan tembakan, menewaskan satu tentara. Konflik pun semakin meluas setelah upaya perundingan yang coba dilakukan oleh dua orang perwira militer Ekuador ditolak oleh pihak militer Peru di Aguas Verdes.

Dari sudut pandang teori perang, kegagalan diplomasi inilah yang pada akhirnya menyulut terjadinya perang. Segera setelah insiden tanggal 5 Juli tersebut, kedua belah pihak mulai saling menyerang.

Pasukan Ekuador yang berkekuatan 2 batalyon Infanteri segera memperkuat kedudukan di wilayah perbatasan. Batalyon Cayambe dengan kekuatan 514 orang dan Batalyon Montecristi dengan kekuatan 265 orang ditempatkan di Huaquillas dan tidak kurang dari 44 tentara dibantu 93 sukarelawan dan 500 carabineros (pasukan para militer Ekuador) memperkuat di garis belakang di wilayah Santarosa dan Aranillas. Sedangkan Peru merespon langkah Ekuador dengan memobilisasi pasukan Komando Militer Utara ke zona sengketa di Aguas Verdes dan daerah sepanjang sungai Zarumilla dengan angka kekuatan total mencapai 11.500 hingga 13.000 orang yang dilengkapi dengan artileri dan kavaleri tank8. Bahkan, di awal serangan Peru juga mengerahkan kekuatan udara dengan membombardir kota-kota di zona sengketa dengan pesawat terbang.

Pergerakan Pasukan Kedua Negara.

Pertempuran antara kedua negara ini sesungguhnya menampilkan dua kekuatan militer dengan perbandingan yang sangat jauh. Untuk mendukung pertempuran tersebut, Ekuador hanya diperkuat oleh truk-truk perang yang sudah usang dan hanya mampu berperan sebagai pengangkut personel. Bantuan tembakan untuk pasukan Ekuador diberikan melalui beberapa pucuk meriam artileri kuno abad 19. Sedangkan di pihak Peru, kekuatan militer jauh lebih lengkap. Tercatat pada saat itu Peru sudah diperkuat dengan 12 unit tank LPT buatan Ceko, 8 pucuk meriam Armed 105 mm, pasukan infanteri lintas udara, dan armada serbu pesawat udara pembom.

Menyadari secara kekuatan militer jauh lebih unggul, Peru segera mengambil inisiatif serangan. Meriam artileri diarahkan untuk menembaki sasaran darat berupa basis-basis pertahanan pasukan Ekuador di wilayah Machala dan Santarosa. Setelah itu, pasukan infanteri ringan dibantu dengan pasukan kavaleri tank segera digerakkan untuk menduduki dan menguasai wilayah perbatasan. Pesawat pembom membantu manuver pasukan eselon depan dengan menghancurkan kota-kota di wilayah perbatasan. Setelah selesai membombardir kota-kota penting di perbatasan, pesawat mengalihkan

serangan di wilayah kota pelabuhan Puerto Bolívar di Ekuador. Hancurnya pelabuhan merupakan pukulan telak bagi Ekuador dan mempengaruhi kepercayaan diri pasukan. Sementara itu, Ekuador yang secara perlengkapan kalah jauh hanya bisa bertahan untuk mencegah infiltrasi yang lebih dalam.

Peru terus meningkatkan tekanan dengan mendorong pasukan depannya maju untuk menyerang propinsi El Oro dan menguasai kota Huaquillas, , Santa Rosa, dan Machala di Ekuador. Bagaimanapun juga, pasukan Peru yang jauh lebih besar dan lebih lengkap yang terdiri dari 13.000 orang dengan cepat mengalahkan sekitar 1.800 pasukan tentara Ekuador. Tentara Peru memiliki kompi baju besi yang terdiri dari tank-tank Ceko, dengan artileri dan dukungan udara. Pada tanggal 27 Juli 1941, untuk menggenapi kemenangan yang telah diraih, Peru menerjunkan pasukan lintas udara di belakang garis pertahanan pasukan Ekuador dan merebut pelabuhan Puerto Bolívar. Penerjungan ini juga menandai untuk pertama kalinya di Amerika bahwa pasukan udara digunakan dalam pertempuran.



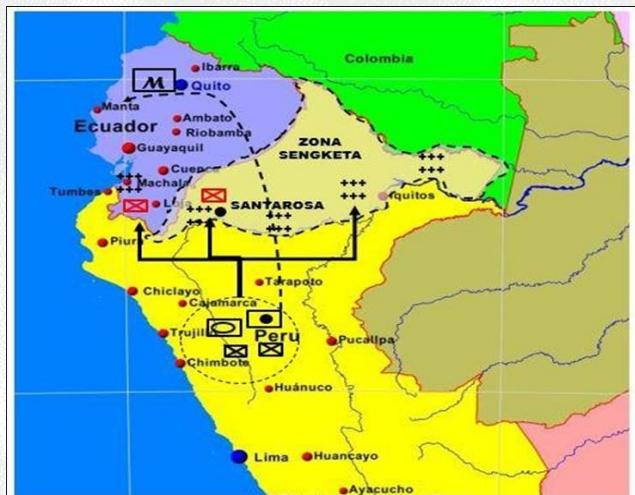
Pesawat Kfir milik angkatan udara Ekuador

Menghadapi situasi ini, mendorong Presiden Ekuador Carlos Alberto Arroyo del Río untuk mempertahankan sebagian besar Angkatan Darat di ibu kota Quito. Untuk menghindari kehancuran total yang lebih parah, Ekuador segera meminta gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 31 Juli 1941. Dengan keluarnya pernyataan tersebut menandakan Perang '41 secara resmi dinyatakan selesai dan Peru menjadi pemenang mutlak. Peru meminta agar Ekuador menarik semua pasukan dan warganya di zona sengketa sebagai syarat ditariknya pasukan Peru dari wilayah Ekuador.

Taktik Perang yang Digunakan.

Dalam pertempuran ini, taktik yang digunakan oleh Peru adalah melaksanakan serangan secara masif dengan memanfaatkan dan mengerahkan kekuatan armada perang yang dimiliki. Kombinasi antara manuver pasukan darat yang dibantu dengan bantuan serangan udara merupakan hal yang baru dalam pertempuran masa itu. Selain itu, dalam perang ini Peru juga mampu mengkombinasikan antara kemampuan manuver pasukan infanteri dan kavaleri tank dengan bantuan tembakan dari pasukan artileri medan. Senjata meriam armed kaliber 105 mm diarahkan untuk menghancurkan garis belakang pasukan musuh. Sementara pasukan pertahanan depan dihancurkan dengan menggunakan tembakan dari 12 unit tank pasukan kavaleri. Serangan udara taktis melalui pembom udara diarahkan untuk menghancurkan sasaran strategis seperti kota-kota penting dan pelabuhan Puerto Bolivar. Untuk mencegah terjadinya perkuatan pasukan dari belakang, Peru menerjunkan pasukan lintas udara untuk menghancurkan musuh di garis belakang dan menguasai pelabuhan.

Sementara Ekuador memilih untuk menggunakan taktik bertahan dalam menghadapi Peru. Keterbatasan personel dan alutsista yang dimiliki memaksa Ekuador memilih taktik ini. Tugas utamanya adalah mencegah agar manuver pasukan Peru tidak dapat melaksanakan infiltrasi lebih dalam ke jantung wilayah Ekuador.



Visualisasi Pergerakan Pasukan
Dalam Perang '41 Antara Peru Melawan Ekuador

Namun taktik Ekuador tidak dapat berjalan lancar karena Peru memiliki pesawat udara dan pasukan paratrooper yang dapat langsung diterjunkan di garis belakang. Keputusan pemimpin Ekuador untuk menghentikan perang dan menyerah dinilai tepat untuk menghindari kehancuran total yang mungkin saja terjadi apabila perang tetap dilanjutkan. Meskipun kalah, upaya untuk perjuangan tetap dilanjutkan dengan taktik gerilya yang dilakukan secara sporadis untuk mengganggu pasukan Peru.

Dampak Perang Bagi Kedua Negara.

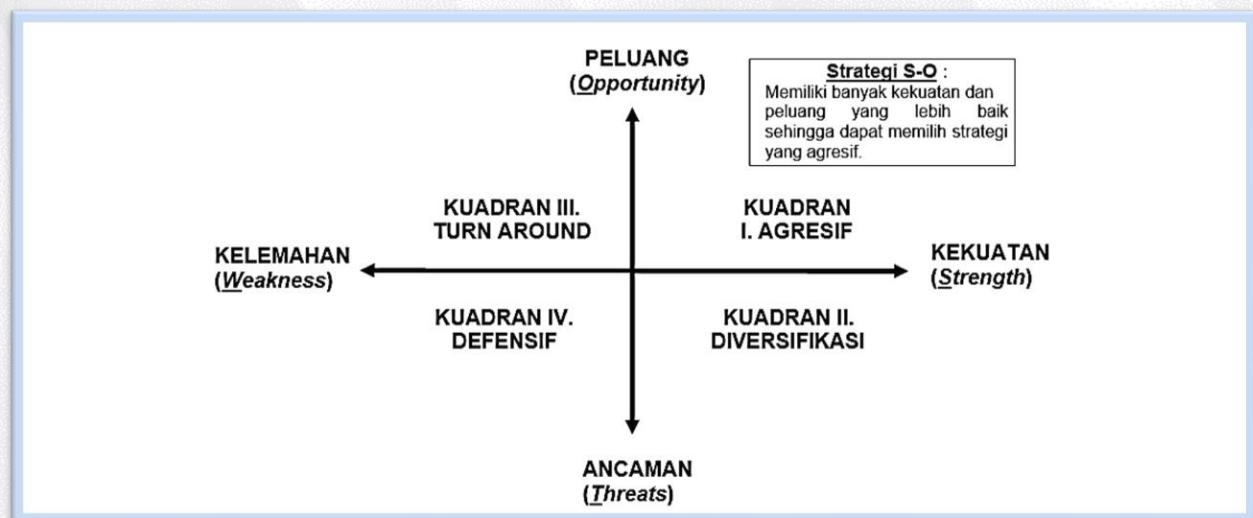
Dengan menyerahnya Ekuador, hasil akhir dari Perang '41 secara mutlak dimenangkan oleh Peru. Akibatnya, Ekuador harus bersedia mengosongkan zona sengketa dan menyerahkan wilayah tersebut kembali kepada Peru. Peru menduduki hampir seluruh provinsi pesisir El Oro di Ekuador dan beberapa kota di provinsi Andes Loja, selain mendorong orang Ekuador kembali di sepanjang garis perselisihan di sepanjang perbatasan Amazon. Penentuan garis batas wilayah selanjutnya dirundingkan oleh kedua negara dengan Brasil dan Argentina sebagai negara mediator. Pemerintah Ekuador, yang dipimpin oleh Dokter Carlos Alberto Arroyo del Río, akhirnya menandatangani Protocolo de Río de Janeiro pada tanggal 29 Januari 1942. Setelah penandatanganan protokol tersebut, pasukan Peru kemudian mundur secara bertahap dari wilayah Ekuador.

Meskipun secara de jure wilayah tersebut masuk dalam otoritas Peru, Ekuador masih tetap berusaha untuk mengambil peran di wilayah tersebut. Akibatnya, di zona sengketa tersebut, sekitar 78 km dari perbatasan Ekuador-Peru dibiarkan tanpa tanda selama lima puluh tahun berikutnya, menyebabkan krisis diplomatik dan militer yang berkelanjutan antara kedua negara. Pada tahun 1981, kedua negara kembali bentrok sebentar dalam Perang Paquisha. Hanya setelah perang Cenepa tahun 1995 perselisihan itu akhirnya diselesaikan. Pada tanggal 26 Oktober 1998, perwakilan Peru dan Ekuador menandatangani perjanjian damai definitif (*Brasilia Presidential Act*).

Lesson Learned yang Bisa Diambil.

Dari penjelasan diatas, perlu dilakukan analis guna mendapatkan lesson learned dari perang yang dilakukan oleh Peru dalam menghadapi Ekuador. Adapun analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis SWOT yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang dimiliki oleh Peru. Penentuan strategi yang akan dipilih pada intinya adalah menentukan faktor paling dominan diantara semua faktor yang mempengaruhi pemilihan taktik dan strategi yang dipilih untuk memenangkan pertempuran. Apabila faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dimasukkan ke dalam tabel analisis SWOT akan diperoleh data sebagai berikut :

<p>STRENGTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah personel lebih banyak - Memiliki alutsista lebih canggih - Didukung banudtis dan sat linud - Memiliki bantem meriam Armed - Memiliki Satuan Kav Tank 	<p>WEAKNESS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasukan teritori utara adalah satuan baru - Biaya perang yang mahal
<p>OPPORTUNITY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didukung anggaran yang besar - Kekuatan ekonomi negara - Dukungan dari warga 	<p>THREAT</p> <p>Penggunaan banudtis dan linud adalah yang pertama.</p>



Secara singkat, analisis dari tiap-tiap kuadran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kuadran I : Negara memiliki kekuatan dan peluang, sehingga dapat dikerahkan untuk mendapatkan kemajuan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah agresif untuk meraih kemenangan.

Kuadran II : Negara menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dengan memilih strategi diversifikasi yaitu dengan menyiapkan beberapa strategi secara pragmatis sesuai dinamika.

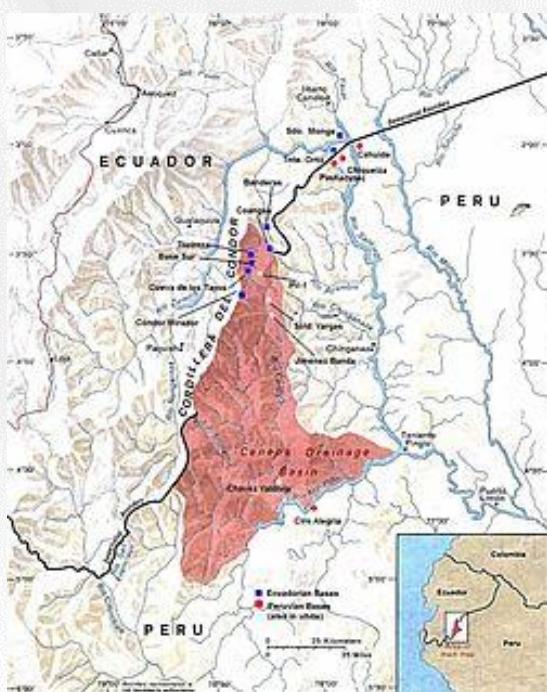
Kuadran III : Negara memiliki peluang (eksternal) yang sangat besar namun masih mempunyai banyak kelemahan secara internal. Strategi yang dapat diambil adalah *turn around* yaitu dengan meninjau kebijakan

untuk merebut peluang dari luar sambil terus berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan baik.

Kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, negara menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi yang digunakan yakni bertahan untuk meminimalisir kelemahan sekaligus menghindari ancaman.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dalam menyelesaikan konflik dengan Ekuador terkait sengketa wilayah perbatasan, strategi yang paling menguntungkan bagi Peru adalah strategi SO karena Peru memiliki lebih banyak keunggulan dan peluang dibandingkan dengan Ekuador sehingga keputusan pemilihan strategi dan taktik untuk menyerang secara ofensif adalah keputusan yang sangat tepat.

Adapun **lesson learned** yang dapat diambil dalam sengketa perbatasan antara Peru dan Ekuador, antara lain : pertama, wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat penting untuk dipertahankan; kedua, pembangunan kekuatan militer secara menyeluruh diperlukan oleh suatu negara dalam mengamankan kepentingan nasionalnya; dan ketiga, pemilihan taktik yang baik, didukung dengan kesiapan personel dan alutsista adalah kunci utama dalam memenangkan pertempuran.



Wilayah Perang, Peru Vs Ekuador Dalam Perebutan Wilayah Perbatasan



Penerbangan Peru melakukan serangan udara terhadap pos perbatasan Ekuador di sepanjang sungai

PENUTUP

Dari esai di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik dengan Ekuador, negara Peru memiliki kemampuan untuk dapat memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, pemilihan strategi ofensif dengan menyerang Ekuador untuk menyelesaikan konflik sudah tepat karena upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Kunci utama kemenangan Peru dalam Perang '41 adalah dimilikinya kekuatan pertahanan yang baik yang didukung oleh personel yang terlatih dan alutsista yang lebih modern. Selain itu, pemilihan taktik yang tepat juga turut menentukan hasil peperangan. Dengan kemenangan ini, Peru berhasil merebut kembali wilayahnya yang selama ini disengketakan.

Mayor Caj R. Prabu Kandihawa, adalah abituren Semapa PK 2005, Jabatan Kasisikmil Ditajenad. Saat ini sedang melaksanakan Dikreg LXI Seskoad.



TINJAUAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI MEKSIKO DIHADAPKAN DINAMIKA PERMASALAHAN PERBATASAN DENGAN AMERIKA SERIKAT

Letkol Cba Afid Handoko, S. Sos., M. Si.

Pendahuluan

Meksiko merupakan bagian dari Amerika Latin, negara Meksiko Serikat terletak di Amerika Utara dan berbatasan dengan Amerika Serikat, Guatemala dan Belize di sebelah tenggara, Samudra Pasifik di barat dan Teluk Meksiko serta Laut Karibia di sebelah timur.¹ Perbatasan antara Meksiko-Amerika Serikat mengundang banyak permasalahan, Meksiko dan Amerika Serikat telah mengukir sejarah bersama yang cukup rumit, serta diwarnai dengan berbagai macam konflik.

Berbagai konteks telah dilakukan dalam hubungan bilateral antara Meksiko dengan Amerika Serikat, seperti sosial, budaya, serta ekonomi. Selain itu, permasalahan gun trafficking penyelundupan senjata di negara Meksiko menjadi masalah karena ada banyak kartel-kartel narkoba disana yang berbahaya. Pada tahun 2006, pemerintah Meksiko yang baru berupaya memberantas organisasi kartel narkoba tersebut dan kartel tersebut menyerang balik. Hal itu yang menyebabkan tindak kekerasan yang meningkat secara pesat. Kartel-kartel tersebut lumayan terorganisir dan disenjatai cukup. Suplai senjata tersebut berasal dari kebanyakan Amerika Serikat dan menurut data dari GAO (*Government Accountability Office*) sekitar 87% senjata api yang beredar di Meksiko kebanyakan berasal dari Amerika Serikat.

Berdasarkan latarbelakang diatas, kompleksitas permasalahan perbatasan menjadi ancaman bagi kedua negara baik Meksiko maupun Amerika. Dihadapkan dengan maraknya Gun Trafficking, menyulitkan pemerintah Meksiko untuk memerangi para kartel narkoba di negara tersebut. Sedangkan dari sisi Amerika, dengan banyaknya imigran yang masuk dari Meksiko ke Amerika menjadikan ancaman bagi Amerika. Adapun pokok-pokok persoalannya adalah : 1) Bagaimana latar belakang terjadinya konflik antar negara yang diselesaikan dengan diplomasi pertahanan negara Meksiko?; 2) Jelaskan langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (soft power) yang digunakan oleh negara Meksiko; 3) Jelaskan solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara tersebut dari perspektif komunikasi persuasive; 4) Jelaskan lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat dari diplomasi pertahanan yang bersifat soft power dari negara tersebut. Berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut, identifikasi persoalan yang muncul adalah "Bagaimana Tinjauan diplomasi dan negosiasi Meksiko dihadapkan dinamika permasalahan perbatasan dengan Amerika Serikat?"

Nilai guna dari penulisan essai ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tinjauan diplomasi dan negosiasi Meksiko dihadapkan dinamika permasalahan perbatasan dengan Amerika Serikat.

Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada tinjauan diplomasi dan negosiasi Meksiko dihadapkan dinamika permasalahan perbatasan dengan Amerika Serikat, dengan tata urut pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan

Konflik perbatasan antara Meksiko-Amerika Serikat pada era kekuasaan Donald Trump menjadi semakin memanas dan dikenal dengan istilah Krisis diplomatik Meksiko-Amerika Serikat 2017. Krisis ini merupakan stagnasi dalam hubungan diplomasi antara dua negara akibat gesekan yang terjadi di antara presiden kedua negara. Krisis ini dimulai ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam Meksiko untuk melakukan negosiasi ulang terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara karena ia menganggap hal itu tidak bermanfaat bagi negaranya. Ia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memperkuat pembatas yang memisahkan kedua negara. Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto mengatakan bahwa ia menentang kedua proposal yang diajukan Presiden Trump. Selanjutnya, Donald Trump dan Enrique Peña Nieto membatalkan pertemuan yang telah mereka jadwalkan di Washington D.C.

Latar belakang terjadinya konflik antar negara yang diselesaikan dengan diplomasi pertahanan negara Meksiko

Berdasarkan data fakta yang ada, sejak kandidat dari partai Republik, Donald Trump, memasuki arena pemilihan presiden pada 16 Juni 2015, salah satu janji utama kampanye yang diusungnya ialah pembuatan sebuah dinding di perbatasan selatan untuk membuat imigrasi ilegal lebih sulit dilakukan oleh orang-orang yang berusaha masuk secara ilegal ke Amerika Serikat dari Meksiko. Selama masa kampanye ia berjanji kepada para pendukungnya bahwa pemerintah Amerika Serikat akan membangun dinding dan Meksiko yang akan membayar untuk biaya pembangunan pagar tersebut. Setelah Donald Trump menjadi calon presiden dari partai Republik, hal tersebut menjadi isu penting dalam kampanye kepresidenannya.

Sebagai tanggapan perihal hal tersebut, pemerintah Meksiko di bawah Presiden Enrique Peña Nieto menyatakan bahwa Meksiko tidak akan membayar untuk dinding perbatasan yang baru. Pemerintah Trump melihat kemungkinan adanya penambahan pajak pada barang-barang yang di impor dari Meksiko untuk membantu mendanai pembangunan dan pemeliharaan dinding perbatasan yang baru.

Awal mula pendirian tembok pemisah antara Meksiko dengan Amerika Serikat telah didirikan sejak tahun 1800-an. Sekitar tahun 1940-an pagar perbatasan dipasang dengan alasan adanya masalah lingkungan. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa ternak Meksiko kerap kali berkeliaran, sehingga membuat kerusakan lingkungan milik Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu berdirilah tembok perbatasan. Pagar perbatasan tak lagi dianggap mampu mengatasi permasalahan tertentu. Pasalnya, para imigran ilegal dari Guatemala, El Salvador, dan Honduras kerap kali berupaya memasuki wilayah Amerika Serikat melalui Meksiko. Bahkan, terkadang terdapat pula beberapa warga Meksiko yang memilih untuk bermigrasi ke wilayah Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan banyak konflik terjadi di wilayah Guatemala, El Salvador, dan Honduras. Beberapa diantaranya yaitu konflik pemeriksaan, perampukan, serta perdagangan narkoba.

Di era George W. Bush presiden Amerika Serikat ke-43 memutuskan untuk mendirikan tembok besar sepanjang 66 mil di sepanjang perbatasan Amerika Serikat, yakni diantara San Diego dengan Tijuana. Namun, setelah beralih pada kepemimpinan Bill Clinton, tembok perbatasan tersebut bertambah panjang sebanyak 14 mil dari sebelumnya. Tentu saja kebijakan Bill Clinton tersebut diupayakan kepada para imigran gelap yang berniat memasuki Amerika Serikat demi memperoleh kehidupan baru. Hingga pada akhirnya, Amerika Serikat dipimpin oleh presiden ke-45, Donald Trump.

Latarbelakang terjadinya konflik perbatasan antara Amerika-Meksiko, disebabkan karena maraknya imigran ilegal dari Guatemala, El Salvador, dan Honduras

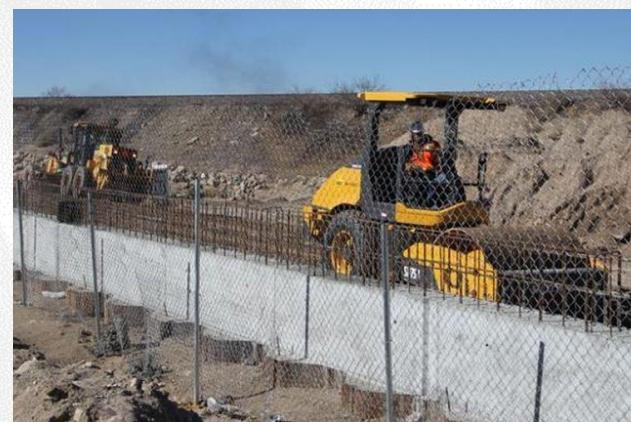
kerap kali berupaya memasuki wilayah Amerika Serikat melalui Meksiko. Bahkan, terkadang terdapat pula beberapa warga Meksiko yang memilih untuk bermigrasi ke wilayah Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan banyak konflik terjadi di wilayah Guatemala, El Salvador, dan Honduras.

Menghadapi kasus imigran gelap tersebut, Trump selaku suksesor dari presiden sebelumnya, memutuskan untuk gencar membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Oleh karena itu, Trump berdiplomasi dengan pemerintah Meksiko agar membayar tembok perbatasan yang telah dibangun oleh Amerika Serikat. Trump juga mengajukan pada Kongres suatu kebijakan baru, yakni pembangunan tembok perbatasan menggunakan uang pajak rakyat atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Amerika. Namun, baik pemerintah Meksiko maupun partai oposisi, Demokrat, merasa kebijakan Trump tersebut kurang relevan (VOA, 2018).

Seperti yang dilansir oleh teleSUR (2019), hingga saat ini pembentukan tembok perbatasan mengundang protes dari masyarakat Meksiko. Pasalnya, Trump berkeinginan menambah panjang tembok perbatasan menjadi beribu-ribu kilometer. Keinginan Trump tersebut juga diiringi oleh upaya penggunaan APBN Amerika. Lantas, perpanjangan tembok perbatasan tersebut berhenti untuk sementara waktu dikarenakan partai oposisi yang masih menentang pendanaan menggunakan APBN. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara adidaya, tidaklah mengejutkan apabila kasus tembok perbatasan di masa kepemimpinan Trump bukanlah rahasia umum. Banyak masyarakat dunia merasa prihatin dan tidak setuju dengan pembentukan tembok perbatasan tersebut. Namun, tak sedikit pula masyarakat hingga aparat pemerintah yang memberikan dukungan terhadap Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya, Trump selaku Presiden Amerika Serikat, resmi mengeluarkan beberapa perintah eksekutif, salah satunya Executive Order 13767. Perintah eksekutif tersebut mengambil topik *“Border Security and Immigration Enforcement Improvements”*.

Sebagai tanggapan akan kasus imigran ilegal dan tembok perbatasan. Sejauh ini, Trump merasa kehadiran imigran ilegal ke Amerika Serikat hanya menjadi ancaman buruk, dikarenakan kerap kali terjadi kasus pembunuhan ataupun perampokan yang disebabkan oleh para imigran gelap (teleSUR, 2019).

Seiring berjalannya waktu, pembangunan tembok perbatasan tersebut kian berkembang pesat. Beberapa masyarakat Meksiko menunjukkan aksi protes terhadap pembangunan tersebut. Akan tetapi, pihak Amerika Serikat tetap bersikeras melakukan mandat Donald Trump. Apabila ditelusuri kembali, pembangunan tembok perbatasan tersebut memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan masyarakat Meksiko, yakni memicu terjadinya keributan ataupun bentrokan. Pasalnya, tanah yang digunakan untuk pembangunan tembok perbatasan tersebut ialah tanah pribadi milik beberapa penduduk sekitar kota Sunland Park, New Mexico.



Situasi perbatasan antara AS dan negara bagian Ciudad Juarez, Meksiko. Presiden Donald Trump menginginkan tembok pembatas



Presiden Donald Trump meninjau perbatasan antara AS dan negara bagian Ciudad Juarez, Meksiko.

Dengan pemberlakuan sedemikian rupa, tidaklah mengherankan apabila masyarakat Meksiko memilih untuk melakukan protes secara langsung. Berdasarkan informasi teleSUR (2019), Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham menyatakan bahwa tembok perbatasan setinggi 6 kaki tersebut bukanlah cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan keamanan maupun krisis kemanusiaan di perbatasan. Ditambah lagi, tembok tersebut hanya menghabiskan biaya yang cukup banyak tetapi tidak mencapai hasil maksimal.

Langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan oleh negara Meksiko

Berdasarkan data fakta yang ada, Tepat pada 25 Januari 2017, Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian eksekutif Amerika Serikat yang dinamakan Executive Order 13767. Di dalamnya tercantum beberapa hal yang menekankan bahwa keamanan perbatasan perlu ditingkatkan lantaran menjadi bagian dari keamanan nasional. Adapun hal-hal yang tercantum dalam Executive Order 13767 secara keseluruhan menetapkan kebijakan bahwa sejak hari itu aturan untuk para imigran yang akan memasuki wilayah Amerika Serikat mulai diperketat. Trump melihat bahwa kehadiran para imigran gelap tersebut hanya meresahkan warga Amerika Serikat lantaran minimnya peraturan yang berlaku⁸.

Di sisi lain, terdapat pula poin utama yang menegaskan bahwa Trump ingin mengajak Meksiko untuk membayar pembangunan tembok perbatasan tersebut. Namun, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pemerintah Meksiko menolak ajakan Trump tersebut. Tak dapat dipungkiri, bahwa Executive Order 13767 juga menekankan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengerahkan kurang lebih 5.000 penjaga perbatasan agar para imigran gelap tidak dapat memasuki wilayah Amerika Serikat tanpa izin.⁹

Segala upaya yang dituliskan oleh Donald Trump dalam Executive Order 13767 tersebut merupakan bukti nyata atas kampanye yang dilakukan sebelum resmi menjadi presiden Amerika Serikat.

Dalam Meckler Trump menyatakan dengan tegas bahwa "suatu negara bukanlah negara apabila tidak memiliki perbatasan". Menanggapi pernyataan Trump tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwa Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Trump sangat sensitif dengan keamanan perbatasan. Sementara itu, pemerintah Meksiko enggan turut campur tangan dalam pembangunan tembok perbatasan tersebut. Akan tetapi, Trump tetap bersikeras mengerahkan aparat pemerintah Amerika Serikat untuk membangun tembok perbatasan di sepanjang Meksiko.

Dapat dikatakan bahwa Meksiko sangat tidak setuju dengan dibentuknya tembok perbatasan tersebut. Namun, Amerika Serikat tetap bersikukuh dan seakan tidak peduli dengan peran Meksiko, sehingga membuat masyarakat Meksiko menjadi gusar. Bahkan, Meksiko sempat memiliki keinginan untuk memutus hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

Langkah-langkah strategis diplomasi pertahanan (*soft power*) yang digunakan oleh negara Meksiko, dengan berbagai upaya seperti : 1) Enrique Peña Nieto, selaku presiden Meksiko berusaha untuk menekankan kepada Trump bahwa negaranya sama sekali tidak mendukung biaya pembentukan tembok perbatasan yang menjulang di sepanjang Meksiko. Tak hanya itu, pemerintah Meksiko juga tidak setuju apabila tembok perbatasan dibangun serta-merta hanya untuk kepentingan Amerika Serikat; 2) Tepat pada 31 Januari 2017, Presiden Enrique Peña Nieto memutuskan untuk membatalkan kunjungan ke Amerika Serikat. Aksi yang diambil oleh Enrique Peña tersebut secara tersirat melambangkan sikap diplomatik Meksiko terhadap Amerika Serikat atas penolakan pembangunan tembok perbatasan. Meskipun tidak mendapatkan dukungan penuh dari beberapa pihak, khususnya Meksiko, Trump tetap bersikukuh menjalankan Executive Order 13767. Hingga pada akhirnya, Executive Order 13767 tersebut menghasilkan zero- tolerance policy terhadap kasus imigrasi ilegal di perbatasan. Untuk diketahui bahwa zero-tolerance policy merupakan kebijakan yang dibuat oleh Trump

dengan memberikan sanksi terhadap para imigran gelap yang memasuki wilayah Amerika Serikat melalui tembok perbatasan. Sanksi tersebut berupa pemisahan antara anak kandung para imigran gelap dengan keluarganya. Hal tersebut dilakukan oleh Trump sebagai upaya pengurangan kasus imigrasi ilegal yang hanya menjadi ancaman bagi keamanan domestik Amerika Serikat; 3) Memanfaatkan keberadaan NAFTA. Forum North American Free Trade Agreement (NAFTA) diprakarsai oleh tiga negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang terbentuk dan diresmikan pada 1 Januari 1994. Keberadaan NAFTA memberikan pengaruh positif terhadap Meksiko dalam konteks migrasi. Namun upaya negosiasi Meksiko melalui NAFTA tetap gagal dan tidak dipandang oleh Donald Trump.



Great Wall' Antara AS dan Meksiko di Sunland Park, AS

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara Meksiko dari perspektif komunikasi persuasif

Penyelesaian permasalahan melalui upaya diplomasi merupakan upaya soft power dengan semua kegiatan dan interaksi untuk menjalankan politik luar negeri suatu negara terkait interaksi dan hubungannya dengan negara atau bangsa lainnya.

Suatu negara, untuk menjalankan kegiatan tersebut memerlukan seorang pelaku yang disebut sebagai diplomat. Diplomat itu sendiri menurut konvensi Wina yang dikutip oleh David Ziegler tahun 1989 didefinisikan sebagai utusan yang mewakili suatu negara atau bangsa dalam menjalankan politik luar negeri dan hubungannya dengan negara atau bangsa lainnya. Keberhasilan dari diplomasi tidak terlepas dari aspek intangible lainnya, yaitu etika.

Dalam melakukan hubungan antar negara atau pergaulan internasional, terdapat standar sosial yang harus dipenuhi. Salah satu etika terpenting dalam menjalankan negosiasi adalah membangun kepercayaan pihak lain dengan mengkondisikan situasi di mana seorang diplomat harus berbohong dan jujur, mematuhi peraturan yang ada, serta menunjukkan minat positif dalam berinteraksi (Jacobs-May, 2012).

Penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara Meksiko dari perspektif komunikasi persuasif baik Amerika maupun Meksiko menggunakan pendekatan komunikasi persuasif yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan dan kemampuan satu sama lain yang berbeda. Komunikasi persuasif pemerintah Meksiko menggunakan pendekatan kompromi karena sadar tidak memiliki kekuatan untuk menekan. Sedangkan dari sisi Amerika menggunakan pendekatan persuasif Power dan Koersi mengandalkan kekuatan/power yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan melakukan penekanan kepada pemerintah Meksiko. Sekuat apapun perlawanan Meksiko tetap akan kalah dan tidak ada jalan selain mematuhi kebijakan yang diterapkan oleh Amerika. Namun, upaya negosiasi dan diplomasi melalui PBB dan NAFTA bisa dilakukan kembali.



Presiden Donald Trump meninjau perbatasan antara AS dan negara bagian Ciudad Juarez, Meksiko.

Dihadapkan pada permasalahan konflik perbatasan Meksiko-Amerika Serikat dapat dilakukan analisa solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara melalui perspektif komunikasi persuasif. Perumusan solusi dilakukan melalui analisa SWOT yang dapat digambarkan sebagai berikut :

SW OT	Strength Pemerintah bertindak untuk keselamatan warganya	Weakness Kekuatan militer dan kekuatan diplomasi dibawah Amerika
Opportunity Terdapat forum NAFTA	STRATEGI S-O Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI W-O Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threat Tindakan kriminal meningkat akibat ulah sebagian imigran	STRATEGI S-T Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI W-T Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Berdasarkan analisa SWOT diatas, solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara Meksiko dari perspektif komunikasi persuasif dilakukan melalui strategi S.O melalui solusi “Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang”. Berdasarkan tinjauan SWOT diatas, penggunaan kekuatan “Pemerintah bertindak untuk keselamatan warganya” perlu memanfaatkan peluang yang ada dihadapkan pada “Terdapat forum NAFTA”.

Analisa SWOT diatas dapat dilanjutkan dengan penentuan solusi S.O didasarkan pada komunikasi persuasif yakni, pemerintah Meksiko melakukan pendekatan persuasif melalui logical persuasion kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan pembangunan tembok pembatas dan berupaya agar bisa dilalui oleh imigran Meksiko. Langkah diplomasi dan negosiasi tersebut dilakukan dengan melibatkan organisasi NAFTA agar pemerintah Amerika mau melunak dengan kebijakannya.

Lesson Learned (Proses Pembelajaran) yang didapat dari Diplomasi Pertahanan yang bersifat Soft Power dari Negara Meksiko

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa pengetahuan/pemahaman yang dapat diperoleh dari permasalahan yang muncul terkait dengan konflik yang terjadi di perbatasan Meksiko-Amerika ditinjau dari perspektif strategi maupun perspektif komunikasi.

Berdasarkan Perspektif strategi pemerintah Meksiko berani menyatakan sikap untuk memutus hubungan diplomatik dengan

Amerika Serikat. Dari perspektif komunikasi, pemerintah Meksiko melakukan negosiasi dan diplomasi dengan Amerika Serikat melalui komunikasi langsung maupun forum NAFTA.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa latarbelakang terjadinya permasalahan konflik perbatasan Meksiko-Amerika Serikat disebabkan karena banyaknya imigran gelap yang masuk ke wilayah Amerikan Serikat dan menyebabkan ancaman bagi keamanan wilayah perbatasan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Meksiko melalui pernyataan sikap tidak ikutserta dalam pembangunan tembok perbatasan dan memikirkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika.

Solusi penyelesaian permasalahan diplomasi pertahanan negara Meksiko dari perspektif komunikasi persuasif melalui analisa SWOT adalah strategi S.O dilakukan dengan upaya melakukan pendekatan persuasif melalui logical persuasion kepada Amerika Serikat dan melibatkan organisasi NAFTA agar Amerika mau melunak. *Lesson learned* dari pembahasan diatas dapat ditinjau dari perspektif strategi dan perspektif komunikasi.

Letkol CBA Afid Handoko S.Sos., M.Si adalah lulusan Sema Pa PK 1998 dan Magister Administrasi Publik Unmer Malang saat ini menjabat sebagai Kabagada Kaporsatlap Subditbinkaporsatlap Sdircab Pusbekangad



PERAN DIPLOMASI DAN NEGOSIASI UNCLOS MENYELESAIKAN KONFLIK MALAYSIA-INDONESIA DALAM PEREBUTAN BLOK AMBALAT

Letkol Cba Agus Santoso, S. M.

Pendahuluan

Wilayah perbatasan antar Negara menyimpan berbagai permasalahan dan prospek yang kompleks. Seperti imigrasi, keamanan wilayah, terorisme, serta perebutan dan klaim wilayah. Daerah perbatasan adalah suatu batas identitas negara, dan pemerintahan (Donnan dan Wilson, 1999). Malaysia dan Indonesia merupakan negara serumpun dan memiliki batas teritorial. Sehingga kedua Negara memiliki potensi kerjasama dan konflik yang sama besarnya.

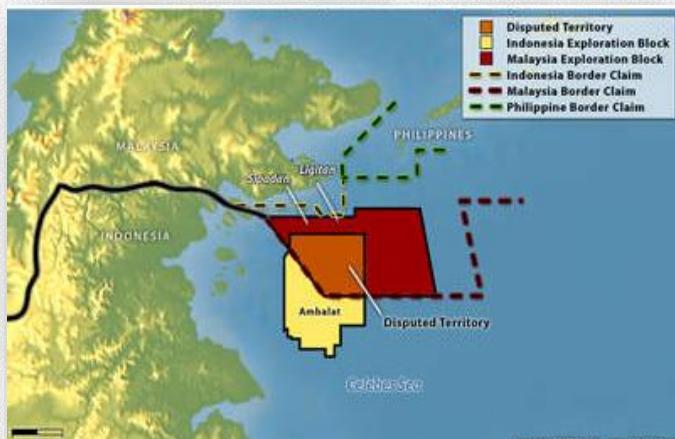
Salah satu konflik yang mencuat antara Negara Malaysia dan Indonesia adalah konflik perebutan wilayah Ambalat. Ambalat merupakan landasan kontinen yang batas-batas berdirinya belum disepakati oleh Indonesia dan Malaysia. Ambalat mempunyai luas 15.235 km² yang terletak di wilayah Sulawesi atau Selat Makasar milik Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada di dekat perpanjangan batasan daratan antara Sabah Malaysia (Bakosurtanal 2009). Penamaan blok laut yang terdapat pada blok Ambalat ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Ketegangan hubungan Malaysia dengan Indonesia semakin meningkat berkaitan dengan klaim kepemilikan masing-

Masing Negara atas wilayah blok Ambalat, wilayah blok Ambalat yang kini menjadi persengketaan antara Negara Malaysia-Indonesia bukanlah merupakan wilayah daratan melainkan berada pada kedalaman laut 2.500 meter di landasan kontinen secara geografis, Blok Ambalat merupakan suatu kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran cekungan tarakan yang berpotensi sebagai minyak dan gas bumi (Starke, 1989: hlm. 392).

Masalah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di kawasan Ambalat muncul sebenarnya sudah melalui proses yang relatif panjang, yaitu pada tahun 1969 sudah mulai diadakan perjanjian tentang garis batas landas kontinen, yang terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak, kemudian sampai pada puncaknya, yaitu setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya, Petronas, memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang diberi nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z). Mencuatnya kasus Ambalat kepermukaan, seperti telah diungkapkan di atas tentunya sudah melalui proses yang cukup lama dan disiapkan secara matang oleh Malaysia serta tidak dapat

dipungkiri bahwa kasus Ambalat adalah suatu kejutan yang sudah terjadi, karena Malaysia secara tegas menyatakan bahwa "Ambalat" adalah hak milik mereka dan sudah dijual kepada perusahaan asing.

Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 M dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat bukan kedaulatan. Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim definitif antara Malaysia dan Indonesia. Dapat dilihat bahwa Wilayah ambalat merupakan milik Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), sementara Malaysia baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat tahun 1979. Dengan demikian mereka secara hukum tidak mempunyai hak cukup kuat sebagai bukti kepemilikan Ambalat. Penentuan garis batas antara kedua negara idealnya mengacu pada UNCLOS dengan memperhatikan keberadaan konsesi sumberdaya alam (minyak, gas) yang sudah ada di kawasan tersebut sejak tahun 1960an.



Wilayah Ambalat di Laut Sulawesi

Malaysia sebenarnya paham secara hukum internasional bahwa Perairan Ambalat adalah milik Indonesia. Namun setelah menangnya Malaysia atas kepemilikan Sipadan-Ligitan sehingga Malaysia lebih arogan untuk meluaskan kembali wilayah kedaulatan negaranya. Sebagai negara pantai biasa yang diatur dalam (UNCLOS) dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

Dalam rangka proses perkembangan hukum internasional baik hukum Internasional regional maupun hukum internasional khusus (special) merupakan hal yang wajar kearah terwujudnya suatu hukum Internasional, yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat Internasional, apapun sistem politik ekonomi, kebangsaan dan kebudayaannya. Pembentukan perjanjian internasional pada hakekatnya, dilakukan melalui perundingan antar individu yang mewakili negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa persoalan antara lain sebagai berikut : Pertama, Latar belakang terjadinya masalah. Kedua, Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi pertahanan (soft power) yang digunakan. Ketiga, Solusi permasalahan diplomasi pertahanan negara. Keempat, Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat. Sehingga dari persoalan yang ada dapat dibuat suatu suatu rumusan masalah yakni : "Bagaimana Optimalisasi Peran Diplomasi dan Negosiasi UNCLOS Menyelesaikan Konflik Malaysia-Indonesia dalam Perebutan Blok Ambalat?"

Adapun pentingnya dalam penulisan ini adalah untuk menjadi bahan pedoman bagi pembaca dalam mengetahui optimalisasi UNCLOS sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik antara Malaysia-Indonesia dalam perebutan Blok Ambalat. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan esai ini adalah studi kepustakaan dimana penulis menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas. Informasi diperoleh penulis dari sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik seperti artikel internasional maupun nasional.

Adapun maksud dan tujuan dari esai ini adalah guna memberi gambaran kepada Pemerintah beserta Komando Atas tentang diplomasi dan negosiasi untuk mencegah adanya konflik. Lalu, manfaat tulisan ini sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan dalam mencegah bahkan menyelesaikan konflik yang dihadapi. Ruang lingkup penulisan esai ini dibatasi pada

optimalisasi diplomasi dan negosiasi UNCLOS/PBB dalam menyelesaikan konflik Malaysia-Indonesia dalam perebutan Blok Ambalat.

Pembahasan

Latar belakang terjadinya masalah.

Wilayah blok Ambalat adalah merupakan suatu area hamparan wilayah laut yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia, terletak di laut Sulawesi yang mengandung kekayaan alam sangat besar berupa minyak bumi dan gas alam dimana luasnya sekitar 15.235 Km dengan posisi geografinya 1180 sampai 1200 bujur timur serta pada garis lintang diantara 30 dan 50 lintang utara. Adapun batas-batasnya secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: Sebelah utara adalah pulau Sipadan & pulau Ligitan, sebelah selatan adalah laut Sulawesi, sebelah barat adalah provinsi Kalimantan Timur, sebelah timur adalah laut Sulawesi. Di lihat dari luas geografinya, kawasan Ambalat termasuk kecil.

Penamaan blok laut yang terdapat pada blok Ambalat ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin meningkat berkaitan dengan klaim kepemilikan masing-masing Negara atas wilayah blok Ambalat, wilayah blok Ambalat yang kini menjadi persengketaan antara Negara Indonesia-Malaysia bukanlah merupakan wilayah daratan melainkan berada pada kedalaman laut 2500 meter di landasan kontinen secara geografis, blok ambalat merupakan suatu kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran cekungan tarakan yang berpotensi sebagai minyak dan gas bumi (Starke, 1989: hlm. 392).

Sengketa ini dimulai ketika perusahaan minyak Malaysia yakni petronas telah memberikan konsensi dan hak eksplorasi kepada the royal duct/ shell group companies perusahaan minyak yang mereka beri nama blok ND6 (Y) dan ND 7 (Z) melalui kontrak bagi hasil pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Indonesia sendiripun telah juga

memberi konsesi pengeboran di blok Ambalat kepada perusahaan Amerika, Unocal dan perusahaan Itali yang di tanda tangani kontrak bagi hasil dilakukan pada tanggal 12 Desember 2004, hal ini bermula dari masalah perebutan minyak gas dan gas yang bergeser kearah kepemilikan atau kedaulatan wilayah suatu Negara tertentu. Hal tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat internasional terutama Negara-negara ASEAN lainnya, dikarenakan sedikit banyak ini akan menimbulkan pengaruh juga terhadap Negara-negara di kawasan tersebut.

Berdasarkan undang-undang Essensial Powers Ordonance yang di sahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas territorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Contiguous Zone. Berdasarkan undang-undang tersebut selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Selanjutnya pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain dapat mengetahuinya.

Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah negara Kepulauan oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa). Klaim Malaysia atas kepemilikan blok Ambalat berdasarkan Peta 1979 dan berdasarkan kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang diberikan kepada Malaysia. Dalam peta 1979 Malaysia tersebut diumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut

yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut 1958 dengan tindakan tersebut Malaysia merugikan negara disekitarnya karena garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya hanya diketahui oleh Malaysia sendiri. Dalam pergaulan Internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis laut teritorialnya agar negara-negara lain dapat mengetahuinya.

Adapun proses klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat dalam konflik ini adalah :

- a. Tahun 1979, Malaysia menggunakan Peta Wilayah Malaysia 1979 yang secara unilateral memasukan wilayah Ambalat;
- b. Malaysia mengklaim wilayah di sebelah timur Kalimantan Timur itu miliknya dan menyebut wilayah Ambalat sebagai Blok XYZ berdasarkan peta yang dibuatnya pada 1979;
- c. Malaysia membuat peta secara sepihak pada 1979. Ditambah lagi bahwa, Malaysia merasa lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat;
- d. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (archipelagic state) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi ini ditetapkan dalam Konferensi Ketiga PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica, pada 10 Desember 1982.
- e. Perusahaan minyak Malaysia yakni petronas telah memberikan konsensi dan hak eksplorasi kepada The Royal Duct/Shell Group Companies perusahaan minyak yang mereka beri nama blok ND6 (Y) dan ND 7 (Z) melalui kontrak bagi hasil pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur.

Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam diplomasi pertahanan (*soft power*).

Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa ber-

dasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan/membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumber daya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia sampai dengan tahun 2002. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan berbagai metode dalam rangka penyelesaian sengketa hukum laut. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*), dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara, karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme Konvensi.

Penyelesaian sengketa diatur dalam Bab XV tentang Settlement of Disputes, Pasal 279 pada intinya menyebutkan bahwa negara-

negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 33 (1) Piagam PBB menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice. Adapun langkah strategis yang dilakukan dalam diplomasi pertahanan pada konflik Malaysia-Indonesia dalam perebutan wilayah blok ambalat adalah berdasarkan hukum UNCLOS adalah:

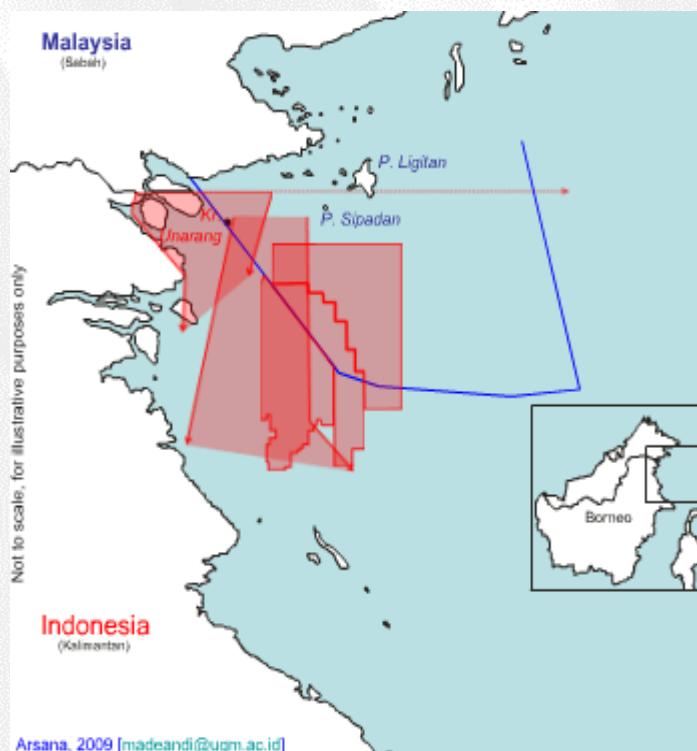
- Negotiation*, atau perundingan diplomatik sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Penyelesaian kasus batas maritim dapat dilakukan dengan negosiasi atau dengan bantuan pihak ketiga. Sejauh ini Malaysia dan Indonesia memilih negosiasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.
- Mediation*, mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu menyelesaikan persengketaan. Mediasi juga banyak digunakan negara-negara lain sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi. Dalam hal tidak tercapainya suatu penyelesaian dengan cara yang tersebut diatas, Konvensi Hukum Laut 1982 mempunyai metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat (non-yurisdikional) lainnya, yaitu dengan metode konsiliasi (conciliation) seperti yang diatur dalam Pasal 284 dan teknisnya diatur dalam Lampiran V Konvensi Hukum Laut 1982.
- Menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh konvensi sesuai dengan Pasal 287 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu: Mahkamah/Tribunal Internasional Hukum Laut; Mahkamah Internasional; Tribunal Arbitrase; Tribunal Arbitrasi khusus.

Solusi permasalahan diplomasi pertahanan negara.

Secara *de jure* dan *de facto*, kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan, begitu rumitnya konfigurasi geografis dari wilayah Ambalat. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini, sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia. Cara yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat dapat ditempuh melalui tiga metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona pembangunan bersama (*joint development zone*), kedua, prinsip yang adil (*equitable principles*), dan ketiga, berdasarkan "Semangat ASEAN".



Prajurit TNI AL melakukan patroli di perairan Ambalat perbatasan Indonesia-Malaysia /Dispen TNI AL



Arsana, 2009 madeandi@ugm.ac.id

Iustrasi Ambalat di Laut Sulawesi

Lesson learned (proses pembelajaran) yang didapat.

Proses pembelajaran yang didapat bahwa upaya diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah Blok Ambalat sudah baik dengan melakukan langkah-langkah strategis guna mencapai kesepakatan dalam sengketa. Namun UNCLOS 1982 sebagai hukum laut yang dibuat oleh PBB masih belum bisa menyelesaikan konflik ini secara optimal karena memang wilayah tersebut sulit untuk dibagi menjadi dua bagian baik untuk Malaysia maupun Indonesia.



United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

Penutup

Konflik yang terjadi antara Malaysia dengan Indonesia dalam perebutan wilayah Blok Ambalat sudah terjadi sejak tahun 1979 dimana Malaysia secara sepakat menerbitkan peta wilayah negara Malaysia yang menunjukkan bahwa Blok Ambalat masuk kedalam wilayah mereka. Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 M dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat bukan kedaulatan. Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim definitif antara Malaysia dan Indonesia.

Dapat dilihat bahwa Wilayah ambalat merupakan milik Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), sementara Malaysia baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat tahun 1979. Dengan demikian mereka secara hukum tidak mempunyai hak cukup kuat sebagai bukti kepemilikan Ambalat. Penentuan garis batas antara kedua negara idealnya mengacu pada UNCLOS dengan memperhatikan keberadaan konsesi sumberdaya alam (minyak, gas) yang sudah ada di kawasan tersebut sejak tahun 1960an.

UNCLOS sebagai sarana diplomasi dan negosiasi sengketa wilayah Ambalat antara Malaysia dan Indonesia masih belum optimal dan berhasil karena sulitnya membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik untuk Malaysia maupun untuk Indonesia. Cara yang paling efektif bagi penyelesaian sengketa Ambalat dapat ditempuh melalui tiga metode, yaitu pertama, dengan cara adanya zona pembangunan bersama (*joint development zone*), kedua, prinsip yang adil (*equitable principles*), dan ketiga, berdasarkan "Semangat ASEAN".



Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Letkol Cba Agus Santoso, S. M. adalah abituren Sepamilwa 1990, Saat ini sedang mengikuti Dikreg LXI Seskoad TA 2021, Jabatan seskarang Kagud Matang Gupus Bekang-1 Pusbekangad.



PASTIKAN PEMANFAATAN MEDSOS MEMBAWA MANFAAT POSITIF DAN KONSTRUKTIF

Ny. Yani Anton Nugroho

Pendahuluan

Penggunaan media sosial (Medsos) oleh prajurit TNI dan keluarganya, sedikit banyak telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dunia tentang TNI. Namun karena sifatnya yang terbuka yang mudah diakses siapa saja, jika tidak dilakukan dengan benar cermat dan waspada penggunaan Medsos juga dapat membawa hal buruk yang membahayakan bagi diri pribadi maupun satuan. Tidak ada larangan penggunaan Medsos oleh prajurit dan keluarganya. Tetapi pastikan pemanfaatan Medsos membawa manfaat positif dan konstruktif bagi kita semua.

Demikian pengarahan Ketua Persit KCK PCBS Seskoad Ibu Yani Anton Nugroho pada acara pengukuhan Ikatan Istri Siswa (IIS) Dikreg LXI Seskoad TA 2021 bertempat di Gedung Jenderal Gatot Subroto Seskoad bandung, Selasa, 3 Agustus 2021. Hal tersebut disampaikan Ibu Yani Anton Nugroho dalam menyikapi banyaknya pihak-pihak yang memanfaatkan media sosial untuk sarana melancarkan aksi-aksi propaganda, fitnah, berita bohong (Hoax) bahkan yang bertujuan memecah belah banyak disebar luaskan melalui media sosial.

Perlu diketahui bahwa Ikatan Istri Siswa (IIS) merupakan organisasi yang dibentuk dengan

tujuan agar para IIS mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dalam mengembangkan kepribadian, wawasan, pergaulan, etika dan lain sebagainya yang akan sangat berguna dalam menjalankan roda organisasi sesuai aturan dan ketentuan.



Acara pengukuhan Ikatan Istri Siswa (IIS) Dikreg LXI Seskoad TA 2021 Selasa 3 Agustus 2021 secara *During*

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Persit KCK PCBS Seskoad juga menyampaikan beberapa pedoman pemanfaatan Medsos bagi Persit Kartika Chandra Kirana sebagai berikut : Pertama, Tidak Menghina, yakni tidak menyampaikan ujaran kebencian dan diskriminatif, SARA maupun Rasis terhadap kelompok masyarakat tertentu; Kedua, Tidak Mengkritik, yakni tidak mengecam atau mendiskreditkan kebijakan, institusi atau pejabat pemerintah.

Bersikap netral dan tidak mengeluarkan pendapat pada isu-isu sensitif; Ketiga, Tidak Menyebar, yakni tidak menyebarkan dokumen/informasi yang bersifat rahasia seperti Surat Telegram, laporan kegiatan, percakapan tertutup, video dan foto latihan dan operasi militer; Keempat, Tidak Mengungkap, yakni tidak mengungkap kegiatan suami atau satuan terkait, lokasi, jumlah/jenis personel dan Alutsista serat kegiatan operasi militer; dan Kelima, Menjaga Netralitas, yakni anggota Persit Kartika Chandra Kirana dalam menggunakan hak pilihnya, agar tidak membawa nama suami atau institusi dan logo satuan dalam konten yang berbau politik.



Pengarahan Ketua Persit KCK Cabang Bs Seskoad di Acara pengukuhan Ikat Istri Siswa (IIS) Dikreg LXI Seskoad TA 2021 Selasa 3 Agustus 2021 secara Diring

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Yani Anton Nugroho bahwa sebagai istri pendamping suami, ibu-ibu harus mampu menjadi pasangan yang harmonis dan dengan penuh keikhlasan dapat menerima suka duka kehidupan sebagai Istri Prajurit. "Dimanapun suami bertugas, istri harus selalu mengikuti tugas suami, berkewajiban menjaga harkat dan martabat serta nama baik suami dalam menjalankan tugasnya", ujarnya.

Dalam kesempatan tersesut, Ketua Persit KCK PCBS Seskoad Ibu Yani Anton Nugroho, juga menyampaikan beberapa hal penting, terkait keberadaan istri prajurit TNI AD.

Pertama, Value, respect and support your spouse, yakni menghargai, menghormati dan selalu mendukung suami dalam kondisi, situasi, posisi maupun kedudukan apapun. Karena karir tidak selalu mulus, tidak mustahil istri adalah anak orang kaya atau Istri wanita karir dengan gaji besar.

"Doronglah suami untuk selalu belajar. Melakukan semua kegiatan untuk meningkatkan karir profesionalismenya. Menjadi saling terbuka akan sangat membantu kita dalam membentuk keluarga yang harmonis," tandasnya.

Karena kehidupan keluarga dengan suasana harmonis, penuh kebersamaan menurut Ibu Yani Anton Nugroho akan sangat mendukung terciptanya suasana yang dapat mendorong produktivitas kerja suami, mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan yang terbaik pada suami, dan perhatian serta pendidikan kepada anak-anaknya, karena kehormatan suami terletak pada sikap, perilaku dan tanggung jawab istri.

"Sebab dalam kegiatan sehari-hari seorang istri sekaligus ibu dari anak-anak, mempunyai peran yang sangat penting dan berpengaruh langsung terhadap kinerja suami dalam menjalankan tugas sebagai seorang perwira TNI," imbuhnya.

Kedua, Learn your resources and benefits, yakni memahami dan mempelajari dengan baik kondisi serta keadaan yang dihadapi, termasuk keuntungan-keuntungan sebagai seorang istri prajurit TNI AD, karena sesungguhnya organisasi Persit Kartika Chandra Kirana didirikan dalam rangka menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi keluarga besar prajurit TNI AD.

"Sebagai contoh di organisasi Persit Kartika Chandra Kirana, kita sangat aktif dalam memajukan dunia pendidikan, melalui pengembangan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Kartika Jaya. Jika sekolah-sekolah yang berada di berbagai wilayah Indonesia ini benar-benar bangkit dan maju sesuai dengan yang kita harapkan, maka ini pada dasarnya adalah peluang bagi kita juga, karena kita akan dapat lebih mudah dalam memilih sekolah yang terbaik bagi masa depan anak-anak kita sendiri. Istri prajurit TNI mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI, baik dalam melaksanakan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi," tandas Ibu Yani Anton Nugroho.

Sebagai Ibu rumah tangga yang berkaitan dengan tugas sebagai pendidik pertama dan utama bagi putra-putrinya, sambung Ibu Yani Anton Nugroho, maka mempunyai pengaruh

yang besar terhadap perkembangan anak. Pendidikan putra-putri agar diarahkan untuk mengembangkan potensi dasar yang dimilikinya menuju terbentuknya kualitas generasi penerus yang berkepribadian, beriman dan bertaqwa serta mempunyai wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Sementara itu sebagai anggota organisasi khususnya di lingkungan Persit Kartika Chandra Kirana, menurut Ibu Yani Anton Nugroho keberadaan istri selalu terkait dengan peran suami dalam jabatannya, oleh karena itu perlu untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuan melalui budaya belajar dan membaca, sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di lingkungan, sekaligus memberikan contoh atau tauladan kepada anggota dengan bertingkah laku dan bertutur kata yang sopan. "Jalin komunikasi dengan baik, karena komunikasi merupakan sarana untuk saling mengenal lebih dekat satu sama lain, mempererat persatuan dan kesatuan, menjalin kebersamaan. Dengan menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis, diharapkan dapat bertukar pikiran dan berbagi pengalaman guna kepentingan dan kemajuan organisasi yang kita cintai ini", ujarnya.

Ketiga, Be a friend with fellow community. Sejarah terbentuknya Persit Kartika Chandra Kirana bahwa bersahabat dengan sesama komunitas dimana ada persamaan rasa senasib dan sepenanggungan adalah sebuah kebutuhan, termasuk bagi ibu-ibu yang juga perlu mengikat diri dalam sebuah hubungan persaudaraan yang positif dengan sesama anggota Persit Kartika Chandra Kirana. "Memiliki teman atau sahabat dan pergaulan dengan latar belakang profesi dan kondisi keluarga yang mirip, akan sangat membantu ibu-ibu sekalian terutama saat dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hidup. Seperti saat ini, momen yang sangat pas dan cobalah berkenalan dengan orang baru di angkatan Seskoad Dikreg LXI (61), ibu-ibu akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru pula", ujar Ketua Persit KCK PCBS Seskoad.

Keempat, Continue to pursue your own needs, wants, desires, and goals. Sebagai istri yang aktif dalam organisasi Persit Kartika

Chandra Kirana tidak menjadikan atau memaksa ibu-ibu untuk menjadi alat yang fokus pada kehidupan militer atau organisasi Persit Kartika Chandra Kirana.

"Ibu-ibu tetap dapat melakukan hobi, pekerjaan, atau kesibukan lain sesuai kebutuhan, bahkan justru organisasi akan membantu memfasilitasinya. Sebagai contoh jika ibu-ibu memiliki hobi memasak atau membuat kue, dapat ditingkatkan menjadi UMKM melalui Persit Kartika Chandra Kirana, sehingga kegiatan yang sekedar hobi ini malah justru akan ditingkatkan menjadi sebuah aktifitas yang menghasilkan", terang Ibu Yani Anton Nugroho.

Selanjutnya sebagai warga masyarakat, Ibu Yani Anton Nugroho juga berpesan kepada para IIS untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan masyarakat sekitar lingkungannya. Kegiatan bersama masyarakat kiranya dapat diarahkan untuk menunjang dan menyukseksan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat.

"Keberadaan dan peran ibu-ibu hendaknya dapat memberikan dampak yang positif dan juga mampu memacu semua warga untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masyarakat disekitar kita", tandas Ibu Yani Anton Nugroho.

Dalam arahannya, Ketua Persit KCK PCBS Seskoad Ibu Yani Anton Nugroho juga menyampaikan kepada IIS Dikreg LXI Seskoad dimanapun suami bertugas istri harus mengikuti tugas suami, berkewajiban menjaga harkat dan martabat serta nama baik suami dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Persit KCK PCBS Seskoad Ibu Tuti Fulad, para Ketua Cabang, pengurus Persit KCK PCBS Seskoad, pengurus Yayasan Kartika Jaya Cabang XI Seskoad, dan para IIS Dikreg LXI Seskoad yang hadir secara virtual di masing-masing Kotama.

Ny. Yani Anton Nugroho adalah Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang BS Seskaoad.

“Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia”.

Ambarawa, 22 Desember 1948
- Jenderal Besar Soedirman -





DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA
17 AGUSTUS 2021

SESKOAD
Terbaik, Terhormat dan Disegani



INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani



ISSN 2086-9312



9772086931295